

**STRATEGI POLITIK PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (PPP) DAN PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) PADA PEMILU
LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

Oleh:

AIRLANGGA WICAKSANA
NIM. 1544300001

Diajukan

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Pada Program Studi Politik Islam**

**JURUSAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2018**

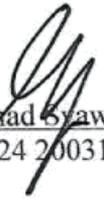
SKRIPSI

**STRATEGI POLITIK PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) DAN PARTAI
DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN
2014 DI KOTA PALEMBANG**
disusun dan dipersiapkan oleh :
AIRLANGGA WICAKSANA
NIM. 1544300001

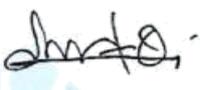
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 30 Juli 2018

Susunan Dewan Pembimbing dan Penguji

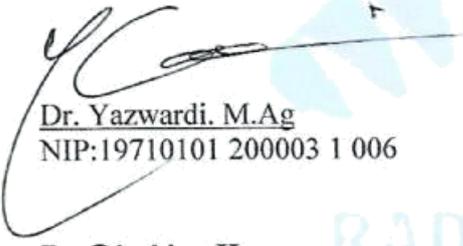
Ketua Dewan Penguji


Dr. Mohammad Syawaluddin, M.Ag
NIP. 19711124 200312 1 001

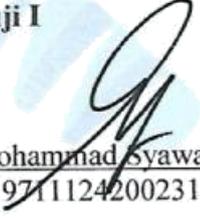
Sekretaris


Otoman, S.S., M.Hum
NIP: 19760516 200710 1 005

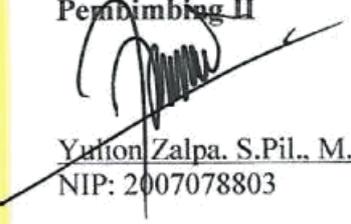
Pembimbing I


Dr. Yazwardi, M.Ag
NIP: 19710101 200003 1 006

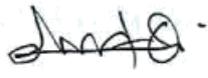
Penguji I


Dr. Mohammad Syawaluddin, M.Ag
NIP. 19711124 20023121001

Pembimbing II


Yulion Zalpa, S.Pil., M.A
NIP: 2007078803

Penguji II


Otoman, S.S., M.Hum
NIP: 19760516 200710 1 005

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Politik Islam (S.Sos)
Tanggal, 18 September 2018



Dekan
Fakultas Adab dan Humaniora


Dr. Nor Huda, M. Ag., M.A
NIP. 19701114 200003 1 002

Ketua Program Studi


Dr. Mohammad Syawaluddin, M.Ag
NIP. 19711124 200312 1 001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Airlangga Wicaksana

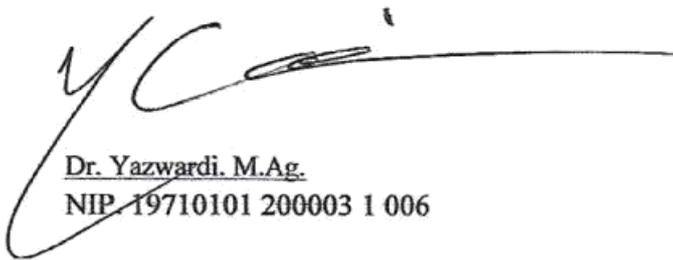
NIM. 1544300001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang dibuat oleh Airlangga Wicaksana Nim: 1544300001

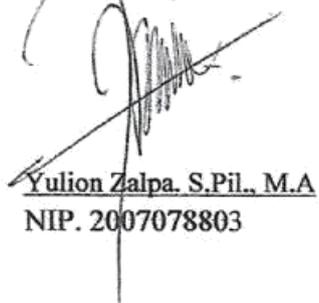
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Palembang, 4-6-2018
Pembimbing I



Dr. Yazwardi. M.Ag.
NIP. 19710101 200003 1 006

Palembang, 2018
Pembimbing II



Yulion Zalpa. S.Pil., M.A
NIP. 2007078803

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara
Airlangga Wicaksana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul :

“STRATEGI POLITIK PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) DAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KOTA PALEMBANG”

Yang ditulis oleh :

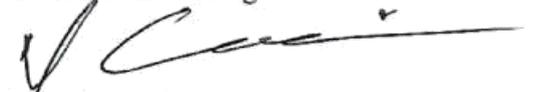
Nama : Airlangga Wicaksana
Nim : 1544300001
Jurusan : Politik Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat dilanjutkan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan Politik Islam.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 4-6 - 2018

Dosen Pembimbing I



Dr. Yazwardi. M.Ag.
NIP. 19710101 200003 1 006

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara
Airlangga Wicaksana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul :

“STRATEGI POLITIK PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) DAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KOTA PALEMBANG ”

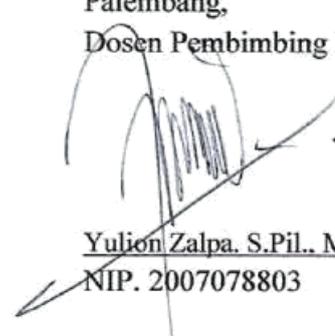
Yang ditulis oleh :

Nama : Airlangga Wicaksana
Nim : 1544300001
Jurusan : Politik Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat dilanjutkan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan Politik Islam.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 2018
Dosen Pembimbing II


Yulion Zalpa, S.Pil., M.A.
NIP. 2007078803

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Everything will be okay in the end, if its not okay, its not the end.

So, keep trying and praying"

Semua akan indah di akhir, jika itu tidak indah, maka ini bukan akhir. Jadi, teruslah berusaha dan berdo'a.

Kupersembahkan Kepada :

- ★ Bapakku dan Ibuku tercinta yang telah memberikan dukungan moril maupun materil selama perkuliahanku sampai sekarang.
- ★ Kedua Kakakku tersayang Agung Ananta CS dan Anjar Cipto Nugroho serta keluarga besarku yang telah mendo'akan dan memberikan motivasi serta semangat kuliah untuk membahagiakan kedua orang tua dan untuk keberhasilanku.
- ★ Sahabat-sahabat seperjuanganku jurusan Politik Islam 2012, KKN posko 111, dan teman-teman semuanya yang telah berjuang bersama dan memberikan semangat, bantuan serta do'a untukku.
- ★ Agamaku dan Almamaterku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan Ridho-Nya lah, akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir dari perjalanan kuliah saya. Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Politik Islam pada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam penyusunan skripsi ini, saya banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam tulisan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nor Huda, M.A, selaku Dekan Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, yang telah memberikan perubahan-perubahan positif dalam lingkungan Fakultas Adab dan Humaniora.
2. Bapak Dr. M. Syawaluddin, selaku Kajur Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, yang telah memberikan ilmu dan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Dr. Yazwardi, M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Yulion Zalpa, S.Pil., M.A selaku pembimbing II, yang telah menyempatkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengoreksi dan memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini serta senantiasa sabar dalam membimbing.
4. Bapak Prof. Dr. H. J. Suyuthi Pulungan., M.A, Ahmad Syukri, S. IP., M. Si, Rylian Chandra, M.A, Kiki Mikail, M.A, Sirajuddin Fikry, SS.M.Hum selaku dosen Politik Islam yang telah memberikan ilmu-ilmunya pada masa perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi.
5. Seluruh bapak/ibu dosen dan staf karyawan Fakultas Adab dan Humaniora yang tidak bisa disebutkan satu-persatu namanya, terima kasih telah memberikan banyak pelajaran dan membimbing serta membantu selama di kampus.
6. Kedua orang tuaku dan keluarga besarku yang telah banyak memberikan dukungan moril dan materi serta doa di dalam perjalanan kuliahku.

7. Pengurus DPC dan DPD PPP dan PDIP Kota Palembang serta staf KPU kota Palembang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat meneliti ditempat tersebut.
8. Sahabat seperjuanganku (Doni Wollanda, M. Aidil Fitriyah, Anggi Dwi Saputri, Utari Indriani) yang selalu memberikan motivasi dan menemani selama penelitian saya berlangsung.
9. Seluruh sahabat-sahabatku jurusan Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora angkatan 2012.
10. Sahabat-sahabatku dari kecil (Andi, Koko, Sidiq, dll) dan teman-temanku sehoobi/kumpul bareng (Angga, Akbar, Doni, Fahdil, Iqbal, Fajri, Jaki, Juli, Kak Didy, Kak Jepri, Seno, Tommy, Zein dll) serta semua teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu-persatu karena tidak muatnya lembar kata pengantar ini, terima kasih telah memberikan motivasi dan contoh yang baik demi masa depan.

Akhir kata, penulis berharap kepada Allah SWT yang dapat membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu. Saya selaku penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyusunan kata dan tata bahasa, karena semua yang benar hanyalah milik Allah SWT dan semua kesalahan terdapat pada hambanya. Semoga kita semua diberi taufik dan hidayah-Nya. Aamiin.

Palembang, 2018
Penulis,



Airlangga Wicaksana
NIM. 1544300001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1) Tujuan Penelitian.....	10
2) Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka Teori.....	12
1) Demokrasi Elektoral.....	12
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Lokasi Penelitian	19
3. Sumber Data.....	20
4. Teknik Pengumpulan Data	20
H. Teknik Analisis Data.....	21
I. Sistematika Pembahasan	23

BAB II TRAJEKTORI POLITIK DAN HISTORISITAS

A. Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP).....	24
a. Program dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).....	26
1. Ideologi.....	27
2. Program Perjuangan.....	29
b. Agenda dan Strategis Perjuangan.....	30
1. Kaderisasi.....	30
2. Membangun Citra Partai.....	33
c. Strategi Implementasi.....	34
d. Program Pemenangan Pemilu.....	35
e. Visi dan Misi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).....	35
B. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).....	36
a. Identitas Partai.....	38
b. Kemandirian dan Demokratisasi.....	42
c. Rekrutasi dan Kaderisasi.....	44
d. Program Menjelang Pemilu.....	48
e. Visi dan Misi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).....	49

BAB III STRATEGI POLITIK PARTAI

A. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).....	52
1. Struktur Kepengurusan Partai.....	52
2. Rekrutmen Caleg.....	55
3. Dana Kampanye (Logistik) dan Pemenangan Caleg.....	57
4. Strategi Pemenangan.....	58
5. Elektabilitas Partai.....	61
6. Jumlah Perolehan Suara Caleg Partai Persatuan Pembangunan Pemilu Legislatif Tahun 2014 Kota Palembang.....	61
B. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).....	66
1. Struktur Kepengurusan Partai.....	66
2. Rekrutmen Caleg.....	70

3. Dana Kampanye (Logistik) dan Pemenangan Caleg.....	74
4. Strategi Pemenangan.....	76
5. Elektabilitas Partai.....	77
6. Jumlah Perolehan Suara Caleg Partai Persatuan Pembangunan Pemilu Legislatif Tahun 2014 Kota Palembang.....	78

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Nama : Airlangga Wicaksana
Program Studi : Politik Islam
Judul : **Strategi Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di kota Palembang**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada pemilu legislatif tahun 2014 di kota Palembang, maka dalam penelitian ini penulis akan mengkaji masalah mengenai strategi yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk memenangkan pemilu legislatif tahun 2014 di kota Palembang. Penelitian ini menggunakan teori Salim yaitu demokrasi elektoral dan pelembagaan partai politik. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus serta berupaya mengungkapkan fenomena melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini ditemukan adanya beberapa strategi yang dilakukan dari kedua partai pada pemilu legislatif tahun 2014 di kota Palembang. Pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mereka menggunakan strategi dengan cara merekrut saksi-saksi yang ada di setiap TPS dan di setiap RT, melalui figur (para tokoh-tokoh yang ada di dalam partai), melalui kultur (seni/budaya) dan melalui struktur partai. Sedangkan pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), strategi yang dilakukan salah satu di antaranya adalah para kader partai melakukan pendekatan-pendekatan persuasif dengan masyarakat melalui tatap muka (berbicara secara langsung), memberikan sosialisasi mengenai arti dari sebuah partai dalam pemilihan, menyamapaikan tujuan dari partai untuk ikut serta dalam pemilihan dan memanfaatkan mesin partai yang merupakan aset pendukung dalam kemenangan pilkada/pileg. Tetapi secara khusus, salah satu indikator keberhasilan strategi kampanye partai adalah dengan memperbanyak sosialisasi di setiap tempat-tempat yang ada di kota Palembang. Dengan mengandalkan komunikator partai yang memiliki potensi dalam menyampaikan pesan-pesan politik kepada masyarakat. Sementara itu, dampak dari pileg tahun 2014 di kota Palembang PPP dan PDIP sendiri tidak berdampak pada elektabilitas dari kedua partai tersebut.

Menjelang pemilu tahun 2014, adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi selama pesta demokrasi berlangsung, salah satu kecurangan yang sering terjadi adalah money politic yang dilakukan oleh kader dari luar maupun dari dalam partai. Oleh karena itu, adanya saran kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk lebih tegas dalam mengatasi masalah seperti money politic yang terjadi pada pesta demokrasi, dengan cara membentuk kelompok (badan) yang mengawasi saat pesta demokrasi sedang berlangsung, supaya tidak adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan seperti terjadinya money politic tersebut.

Kata Kunci : Strategi Politik, Pemilu Legislatif 2014, Kota Palembang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada pemilu legislatif tahun 2014 di kota Palembang, dimana dari kedua partai tersebut masing-masing memiliki strategi/cara tersendiri untuk memenangkan pemilu baik dari calon anggota yang mencalonkan maupun dari parpolnya sendiri. Berdasarkan dari para pengamat/para sarjana ilmu politik, bahwa partai politik merupakan sekelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang disatukan dan didorong oleh suatu ideologi tertentu, yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan lewat pemilihan umum guna melaksanakan kebijaksanaan umum yang mereka susun. Kebijaksanaan umum partai tersebut merupakan hasil pemaduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan cara mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan guna melaksanakan kebijaksanaan umum itu adalah lewat pemilihan umum (pemilu).¹

Sebuah partai politik menurut Miriam Budiarjo adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai

¹ Elly M. Setiadi dan Kolip Usman, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Kencana PRENADAMEDIA Group, 2013) hlm. 277-278.

orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini yaitu untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Fungsi dari partai politik², yaitu:

1. Sarana komunikasi politik;
2. Sarana sosialisasi politik;
3. Sarana pengangkatan anggota politik;
4. Sarana pengatur konflik.

Sebelum proses atau tahapan pemilihan umum berlangsung, maka setiap partai akan melakukan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan salah satunya yaitu dengan berkampanye. Kampanye sendiri mempunyai strategi yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh sebanyak mungkin dengan cara memperoleh hasil yang baik dalam pemilu, agar dapat mendorong kebijakan-kebijakan yang dapat mengarah kepada perubahan masyarakat. Dalam masyarakat demokratis, pengambil-alihan kekuasaan dan peluang untuk merebut pengaruh dilakukan melalui pemilu yang demokratis dalam berbagai bentuk. Tujuannya adalah untuk memperoleh bagian suara yang cukup dalam pasar pemilu, agar dapat memiliki pengaruh atas pihak eksekutif secara konstitusional. Strategi kampanye untuk memperoleh kekuasaan seringkali dipandang sebagai hal yang buruk, bahkan oleh partai politik sendiri. Tetapi jelas bahwa tanpa adanya

² Rabi'ah, *Lebih Dekat Dengan Pemilu Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009) hlm. 28-29.

kekuasaan yang dimiliki oleh politisi atau partai sendiri, maka konsep politik pihak lainlah yang akan diterapkan.³

Di Indonesia partai politik merupakan bagian dari kehidupan politik selama kurang lebih 100 tahun. Di Eropa Barat, terutama di Inggris, partai politik telah muncul jauh sebelumnya sebagai sarana partisipasi bagi beberapa kelompok masyarakat yang kemudian meluas menjadi partisipasi seluruh masyarakat dewasa. Saat ini partai politik ditemukan di hampir semua negara di dunia. Di Indonesia, terutama kita mengenal sistem multi-partai sekalipun gejala partai-tunggal dan dwi-partai tidak asing dalam sejarah kita. Sistem yang kemudian berlaku berdasarkan sistem, 3 orsospol dapat dikategorikan sebagai sistem multi-partai dengan dominasi satu partai. Tahun 1998 mulai masa Reformasi, Indonesia kembali ke sistem multi-partai (tanpa dominasi satu partai).⁴ Partai politik di Indonesia setidaknya mengandung 3 kelemahan utama, yaitu (1) ideologi partai yang tidak operasional sehingga tidak saja sukar mengidentifikasi pola dan arah kebijakan publik yang diperjuangkannya tetapi juga sukar membedakan partai yang satu dengan partai lain; (2) secara internal organisasi partai kurang dikelola secara demokratis sehingga partai politik lebih sebagai organisasi pengurus yang bertikai daripada suatu organisme yang hidup sebagai gerakan anggota; (3) secara eksternal kurang memiliki pola pertanggungjawaban yang jelas kepada publik.⁵

Pemilihan umum (pemilu) adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-

³ Peter Schroder, *Strategi Politik edisi revisi Pemilu 2009* (Jakarta: Friedrich-Nauman-Stiftung fur die Freiheit, Indonesia 2008) hlm. 7.

⁴ Prof. Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik edisi revisi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008) hlm. 422.

⁵ <https://dewapurnama.files.wordpress.com/pdf> (Diakses Pada tanggal 19 Maret 2017).

jabatan di sini beraneka-ragam, mulai dari Presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan sampai kepala desa. Sistem pemilu yang digunakan di Indonesia adalah asas langsung, umum, bebas, rahasia (luber), serta jujur dan adil. Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) yang semula dilakukan oleh MPR disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Di tengah masyarakat, istilah “pemilu” lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali.⁶

Tahun 2014 merupakan pemilu keempat yang dilaksanakan pada masa reformasi. Penyelenggaraan pemilu ini secara umum dapat dikatakan berjalan dengan lancar dan aman. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upaya evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu ke depan. Salah satu hal yang patut dikritisi adalah terkait dengan tujuan pemilu sebagai upaya legal untuk penyederhanaan sistem kepartaian. Secara legalitas hal tersebut diupayakan dengan cara menaikkan *Parliamentary Threshold* (PT) menjadi 3,5%. Namun fakta yang terjadi justru pemilu 2014 menghasilkan 10 partai politik di parlemen. Hal ini sangat kontras dengan pemilu 2009 dengan PT 2,5% yang menghasilkan 9 partai politik parlemen. Di sisi lain, pemilu 2014, baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, justru

⁶ Rabi'ah, *Lebih Dekat Dengan Pemilu Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009) hlm. 46-47.

menghasilkan kegaduhan hubungan politik antara eksekutif dan legislatif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa peristiwa politik di awal-awal masa pemerintahan hasil pemilu 2014. Kegaduhan pemilihan pimpinan DPR dan MPR merupakan gejala awal dari hiruk-pikuknya politik di parlemen. Sebuah pelembagaan pemilu secara legal dengan kepentingan untuk mewujudkan sistem multi partai sederhana serta menjamin efektifitas penyelenggaraan sistem presidensiil haruslah dijadikan landasan utama dalam proses intitusionalisasi tersebut. Kondisi tersebut yang kemudian menginisiasi bagi pelaksanaan kajian terkait pelembagaan pemilu ke depan. Kajian ini bermaksud mengelaborasi pemilu tahun 2014 dengan segala pernik-pernik di dalamnya, sebagai dasar bagi upaya masukan atas persiapan institusionalisasi pemilu ke depan dalam rangka pewujudan sistem multi partai sederhana dan efektifitas sistem presidensiil.⁷

Sistem pemilihan umum merupakan metode yang mengatur dan memungkinkan warga negara memilih para wakil rakyat di antara mereka sendiri. Dalam pemilu tersebut warga negara berhak untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di jabatan publik. Dalam menggunakan suaranya tersebut tentu saja haruslah didukung kondisi yang memungkinkan warga negara memilih secara bebas tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Sistem pemilu memiliki dimensi yang sangat kompleks.

⁷ Hans, dkk: Denied, Dismissed or Redundant? A Critique, dalam *Political Parties: Old Concepts and New Challenges*, Richard Gunther, Jose Ramon-Montero dan Juan J. Linz (ed.), Oxford University Press, 2002.

Beberapa dimensi tersebut antara lain⁸ adalah:

1. Penyuaaraan (balloting) adalah tata cara yang harus diikuti pemilih yang berhak menentukan suara. Jenis penyuaaraan dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu kategorikal (pemilih hanya memilih satu partai atau calon) dan ordinal (pemilih memiliki kebebasan lebih dan dapat menentukan prefensi atau urutan dari partai atau calon yang diinginkannya).
2. Besaran distrik adalah berapa banyak anggota lembaga perwakilan yang akan dipilih dalam satu distrik pemilihan. Besar distrik dapat dibagi menjadi 2, yaitu distrik beranggota jamak. Besaran distrik berpengaruh terhadap tingkat kompetisi partai dalam memperebutkan kursi. Semakin besar magnitude sebuah distrik maka semakin rendah kompetisi partai untuk memperebutkan kursi. Sebaliknya, semakin kecil magnitude sebuah distrik maka semakin ketat kompetisi partai untuk memperebutkan kursi.
3. Pembuatan batas-batas representasi, cara penentuan distrik merupakan hal yang krusial di dalam pemilu. Ada dua hal penting yang harus dipertimbangkan dalam menentukan batas-batas pendistrikian, yaitu masalah keterwakilan dan kesetaraan kekuatan suara.
4. Formula pemilihan (electoral formula) adalah membicarakan penerjemah suara menjadi kursi. Secara umum formula pemilihan dibedakan menjadi 3, yaitu formula pluralitas, formula mayoritas dan formula perwakilan berimbang.

⁸ Sigit dan Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, Yogyakarta, 2009., hlm.14-23.

5. Ambang batas (threshold) yaitu tingkat minimal dukungan yang harus diperoleh sebuah partai untuk mendapatkan perwakilan. Batas minimal itu biasanya diwujudkan dalam presentase dari hasil pemilu.
6. Jumlah kursi legislatif, berapakah jumlah kursi legislatif yang ideal adalah sebuah pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Belum diketahui mengapa suatu negara menetapkan jumlah kursi di parlemen beserta alasannya.

Keenam unsur di atas yang membentuk sistem pemilu. Bagaimana sistem pemilu akan digunakan serta untuk tujuan atau kepentingan apa sistem pemilu harus didasarkan pada keenam unsur tersebut. Dengan demikian, unsur tersebut merupakan bagian penting dalam upaya rekayasa sistem pemilu dalam mencapai tujuan atau kepentingan tertentu. Dewan Pimpinan Cabang PPP kota Palembang mulai menyusun daftar panjang calon legislatif untuk pemilihan umum tahun 2014 mendatang. “Untuk calon legislatif tahun 2014 kita masih menyusun daftar panjang kader partai yang potensial di dalam partai,” kata ketua DPC PPP Palembang, Azhari Mawardi.⁹

Menurut beliau, selain kader partai yang potensial juga calon legislatif dari luar partai dan nanti akan didaftar panjang dahulu. “Jadi, kita harapkan calon itu adalah orang-orang yang mampu meraih suara banyak di daerah pemilihan masing-masing pada pemilu mendatang,” katanya. Ia mengatakan, pada pemilu mendatang minimal PPP bisa memperoleh 1 kursi di setiap daerah pemilihan kota Palembang. Pada pemilu lalu di Palembang ada 5 daerah pemilihan dan PPP hanya mendapat 3 kursi, ujarnya.

⁹ <http://m.antarsumsel.com/berita/261245/ppp-palembang-muai-data-calon-legislatif-2014>(Diakses pada 19 Maret 2017).

Ia menyatakan, sehubungan dengan hal itu, maka pada pemilu mendatang jika masih 5 daerah pemilihan, berarti PPP menambah 2 kursi lagi sehingga menjadi 5 kursi di DPRD Palembang. Daftar calon legislatif itu paling lambat 31 Desember 2011 sudah selesai sehingga pada Januari 2012 sudah siap dan akan dikirimkan ke Dewan Pimpinan Pusat PPP, tutur dia. Mengenai kriteria calon legislatif itu sendiri, ia menjelaskan bahwa kalau dari dalam partai adalah tokoh dan kader-kader PPP potensial yang dimasukkan sedangkan dari luar partai mereka mau membuat kartu anggota. Yang jelas mengutamakan kader potensial dan dari luar partai, karena PPP merupakan partai terbuka. Pada peringatan tahun baru Islam itu juga hadir Sekretaris Dewan Pimpinan wilayah PPP Sumatera Selatan, Agus Sutikno dan pengurus lainnya, kemudian pengurus DPC PPP Palembang, masyarakat dan tokoh masyarakat serta kader partai tersebut.¹⁰

Sedangkan pada PDIP sendiri pada program di tahun 2014, ditargetkan semua kader partai itu dapat masuk dalam jajaran pimpinan DPRD dengan minimal untuk jabatan ketua dewan menjadi sembilan orang pada sembilan wilayah. Sekretaris PDIP Sumsel mengatakan, di Sumsel sendiri diputuskan tiga DPC PDIP sebagai pelopor, yakni DPC PDIP Palembang, OKI dan OKU. Semula menurut dia, diusulkan tujuh daerah yang menang pemilu terakhir tersebut diusulkan sebagai cabang pelopor, kecuali Palembang.¹¹

DPC PDIP pelopor itu kriterianya menang pemilu terakhir dan kepala daerahnya berasal dari PDIP, ujar dia. Karena itu kata beliau pula, upaya yang

¹⁰ <http://m.antarsumsel.com/berita/261245/ppp-palembang-muai-data-calon-legislatif-2014>(Diakses pada 19 Maret 2017).

¹¹ <https://m.merdeka.com/politik/pdip-target-dapat-pimpin-dprd-se-sumsel.html>(Diakses pada 19 Maret 2017).

harus dilakukan antara lain dengan mulai merebut posisi strategis di desa supaya dipegang oleh kader PDIP, hingga meraih pula posisi bupati dan wali kota maupun gubernur di daerah ini.¹²

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan penjelasan dan penjabaran dari identifikasi dan pembatasan masalah.¹³ Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, supaya pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu melebar, maka perlu adanya perumusan masalah yang akan diteliti yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Parpol Islam (PPP) dan Parpol Nasional (PDIP) pada pemilu legislatif tahun 2014 di kota Palembang?
2. Bagaimana dampak pileg tahun 2014 terhadap elektabilitas Parpol PPP dan PDIP di kota Palembang?

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah adalah usaha menetapkan masalah dalam batasan penelitian yang akan diteliti. Suatu penelitian membutuhkan pembatasan masalah dengan tujuan untuk dapat menghasilkan uraian yang sistematis dan tidak melebar. Maka batasan masalah dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan strategi yang dilakukan oleh partai politik Islam (PPP) dengan partai politik nasional (PDIP) dan dampak elektabilitas dari kedua parpol pada pemilu legislatif tahun 2014 di kota Palembang.

¹² <https://m.merdeka.com/politik/pdip-target-dapat-pimpin-dprd-se-sumsel.html>(Diakses pada 19 Maret 2017).

¹³ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) hlm. 26.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian dan ada pun yang jadi tujuan dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui bagaimana strategi Parpol Islam (PPP) dan Parpol Nasional (PDIP) pada pemilu legislatif tahun 2014 di kota Palembang.
- b. Untuk mengetahui dampak elektabilitas dari kedua parpol (PPP dan PDIP).

2) Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat, baik untuk penulis itu sendiri, orang lain dan terlebih lagi untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengasah kemampuan dalam membuat karya tulis ilmiah, serta melalui penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis mengenai permasalahan yang diteliti.
- b. Secara teoritis, hasil penelitian ini sekiranya dapat bermanfaat, sehingga dapat ditindak lanjuti dengan penelitian lebih luas dan mendalam tentang strategi partai politik Islam dan nasional.
- c. Secara akademis dapat menambah refresentasi bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan Politik Islam fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berfungsi untuk menjelaskan posisi masalah yang akan diteliti di antara penelitian yang pernah dilakukan penelitian lain agar tidak terjadi

duplikasi (plagiat).¹⁴ Oleh karena itu, penyusun menyajikan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

“Strategi partai politik dalam menghadapi pemilu 2014” yang ditulis oleh saudari Debora Sanur Lindawati. Skripsi ini memaparkan tentang strategi yang dilakukan oleh para partai politik dalam menghadapi pemilu pada tahun 2014.

“Strategi kampanye humas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam meningkatkan citra partai menjelang pemilu 2014” yang ditulis oleh saudari Elvira Hannum. Skripsi ini memaparkan tentang bagaimana peran dan strategi humas dalam meningkatkan citra partai menjelang pemilu tahun 2014.

“Pelebagaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP): studi kasus kandidasi pemilihan walikota dan wakil walikota Malang tahun 2013 yang ditulis oleh saudari Stefany Debora. Skripsi ini memaparkan tentang pelebagaan PDIP dalam proses kandidasi pilkada kota Malang tahun 2013.

Setelah melihat penelitian terdahulu, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang strategi politik terhadap Parpol Islam (PPP) dan Parpol Nasional (PDIP) pada pemilu legislatif tahun 2014 di kota Palembang. Peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi politik Parpol Islam (PPP) dan Parpol Nasional (PDIP) pada pemilu legislatif tahun 2014 yang ada di kota Palembang.

¹⁴ Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora IAIN Raden Fatah, 2013)* hlm. 19.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu landasan pemikiran untuk memperkuat suatu penjelasan dalam pembahasan judul penelitian ini. Penelitian ini memiliki kerangka pikir yang dibangun dengan cara beberapa kajian teoritis yang disesuaikan dengan pendekatan (*Approach*), konsep (*Concept*) dan teori (*Theory*) yang digunakan.

- **Demokrasi Elektoral**

Demokrasi elektoral merupakan konsep dalam sebuah demokrasi dimana terdapat sebuah sistem konstitusional yang menyelenggarakan pemilihan umum multipartai yang kompetitif dan teratur dengan hak pilih universal untuk memilih anggota legislatif dan kepala eksekutif. Menurut Larry Diamond konsep minimalis tentang demokrasi elektoral juga mengakui tingkat kebebasan tertentu (berbicara, pers, organisasi dan berserikat) agar kompetisi dan partisipasi menjadi lebih bermakna.¹⁵

Demokratisasi di Indonesia mempunyai persoalan dalam pelebagaan nilai-nilai demokrasi. Setidaknya ada 4 aspek yang krusial dan membutuhkan perhatian serius, yaitu: 1. Aspek desain kelembagaan dari sistem politik yang mengabaikan kebutuhan dan kecendrungan budaya politik yang ada; 2. Aspek perbaikan performa partai politik yang kinerjanya terukur dan mempunyai *party rooting* yang semakin mapan; 3. Sistem pemilu yang tidak disusun secara sistematis, logis dan taat asas dan 4. Susunan kedudukan di pemerintahan dimana unsur kinerja

¹⁵ Larry Diamond (2003) Op.Cit. hlm. 9.

optimal dari eksekutif dan legislatif bisa dikenali dari hasil legislasi yang kredibel.¹⁶

Komponen Demokrasi Elektoral

a. Pemilu

Menurut Huntington Pemilu sebagai media pembangunan politik rakyat dalam negara modern. Partisipasi politik merupakan arena seleksi bagi rakyat untuk mendapatkan jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan.¹⁷ Przeworski dalam mendefinisikan demokrasi lewat pemilu, ia menyebutkan pemilu merupakan sarana untuk mengisi jabatan-jabatan di pemerintahan.¹⁸ Sedangkan pemilu sendiri mempunyai fungsi¹⁹:

Bottom up;

- 1) Rekrutmen politisi.
- 2) Membentuk pemerintahan.
- 3) Sarana membatasi perilaku dan kebijakan pemerintah.

Top down;

- 1) Memberi legitimasi kekuasaan.
- 2) Sirkulasi dan penguatan elit.
- 3) Menyediakan perwakilan.
- 4) Sarana pendidikan politik.

¹⁶ Pipit R Kartawidjaja/Aminuddin dan M Faishal. 2014. *Demokrasi elektoral bagian 1 perbandingan Sistem dan Metode Kepartaian dan Pemilu*. (Surabaya:Sindikasi Indonesia).

¹⁷ Efriza, *Political Explore; Sebuah Kajian Ilmu Politik*. (Bandung: Alfa Beta, 2012) hlm. 358.

¹⁸ Larry Diamond (2003), Op.Cit. hlm. 9-10.

¹⁹ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan. (Yogyakarta: FISIPOL UGM, 2009) hlm. 5.

b. Partai politik

Dalam kehidupan yang demokrasi seperti di Indonesia sekarang ini, partai politik merupakan instrumen yang wajib ada disuatu negara yang menjalankan demokrasi. Bahkan pendapat yang ekstrim mengatakan bahwa tidak ada demokrasi ketika tidak ada partai politik di dalamnya, karena partai politiklah yang memainkan peranan penting dalam sistem demokrasi. Dengan adanya partai politik maka masyarakat akan merasakan mempunyai negara atau pemerintah, karena ketika tidak ada kekuatan penyeimbang dari penguasa maka kecenderungannya adalah kekuasaan tersebut akan digunakan secara berlebihan dan tentunya masyarakatlah disini yang akan selalu dirugikan melalui kebijakan-kebijakannya. Menurut Carl J. Friedrich mendefinisikan partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil serta materil.²⁰

Dari definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dewasa dengan landasan kepercayaan tentang nilai-nilai tentang masyarakat yang dicita-citakan. Selanjutnya organisasi tersebut digunakan untuk menciptakan masyarakat yang dicita-citakan melalui cara-cara yang sah yaitu dengan mendapatkan kekuasaan dibidang politik. Dengan dimilikinya kekuasaan tersebut maka mereka akan lebih mudah untuk menciptakan masyarakat yang dicita-citakan melalui kebijakan-kebijakan yang

²⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). hlm. 404.

dibuat. Ketika definisi diatas belum memberikan gambaran yang utuh tentang partai politik maka untuk lebih jelasnya kita lihat apa fungsi dari partai politik tersebut. Ada beberapa fungsi partai politik²¹:

1. *Sosialisasi politik* adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat, melalui proses sosialisasi politik inilah masyarakat mengetahuinya arti pentingnya politik beserta instrumen-instrumennya.
2. *Rekrutmen politik* adalah pemilihan atau seleksi pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Dalam rekrutment politik ada dua mekanisme²²: *Pertama*; rekrutmen terbuka, yang mana syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. *Kedua*; rekrutmen tertutup, berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Pembacaan yang teliti terhadap fenomena rekrutmen politik dapat menjelaskan banyak hal dari dinamika partai politik²³:

- a) Rekrutmen politik dapat menunjukkan lokus dari kekuasaan partai politik.

²¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 1992) hlm. 166.

²² Fadillah Putra, *Partai Politik dan Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) hlm. 209.

²³ Sigit pamungkas, *Partai Politik Teori dan Praktek di Indonesia* (Yogyakarta: Institute For Democracy and Welfarism, 2011) hlm. 90-91.

- b) Rekrutmen politik menggambarkan perjuangan kekuasaan internal partai politik.
 - c) Rekrutmen politik dapat menunjukkan politik representatif yang berusaha dihadirkan oleh partai politik.
 - d) Rekrutmen politik menggambarkan bagaimana sirkulasi elit terjadi.
 - e) Rekrutmen politik menjadi penentu wajah partai diruang publik.
 - f) Rekrutmen politik berada pada posisi sentral dalam mendefinisikan tipe kepartaian.
3. *Pemandu kepentingan* merupakan kegiatan menampung, menganalisis dan memadukan kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi berbagai alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Itulah yang dimaksud dengan fungsi pemandu kepentingan.
 4. *Komunikasi politik* adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintahan kepada masyarakat dan dari masyarakat ke pemerintah. Informasi merupakan hal yang sangat penting ketika kita berbicara organisasi modern, karena organisasi (pemerintah) tersebut akan dapat mempertahankan kekuasaan ketika mengerti apa saja yang menjadi kebutuhan dari masyarakatnya.
 5. *Pengendalian konflik*, partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan kedalam

musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.

6. *Kontrol politik* adalah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintahan. Produk dari pemerintahan ada suatu kebijakan, kebijakan-kebijakan ini yang kemudian akan menyangkut kepentingan masyarakat umum. Pada titik inilah kemudian kontrol partai politik memainkan fungsinya untuk menyikapi suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait kelemahan yang ada dan kemana alokasi nilai-nilai kebijakan itu akan diberikan.
7. *Kaderisasi partai politik*, kader adalah kelompok manusia yang terbaik karena dipilih merupakan inti dari kelompok yang lebih besar dan terorganisir secara permanen.²⁴ Kaderisasi merupakan proses pendidikan jangka panjang yang dilakukan organisasi (partai politik) untuk pengoptimalan potensi-potensi kader dengan cara mentransfer dan menanamkan nilai-nilai tertentu hingga nantinya akan melahirkan kader-kader partai yang tangguh.
8. *Partisipasi politik*, dalam demokrasi partisipasi merupakan kata kunci yang sangat bermakna bagi demokrasi itu sendiri. Demokrasi tanpa partisipasi maka demokrasi tersebut akan kehilangan akar maknanya. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Huntington, partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksudkan untuk

²⁴ www.mpk.muhammadiyah.or.id. (Diakses pada tanggal 27 Agustus 2018).

mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.²⁵ Di negara-negara yang menganut demokrasi, individu-individu dari warga negara (sebagai pemegang kedaulatan) benar-benar diberikan ruang untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan, baik dalam pemilu maupun dalam kegiatan lain seperti diskusi, demonstrasi dan lain sebagainya. Sangat penting kiranya warga berpartisipasi karena nasib mereka dimasa yang akan datang tersebut sangat bergantung pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (presiden, gubernur atau walikota dan bupati), apakah itu dewan perwakilan rakyat pusat atau dewan perwakilan daerah. Dari pihak-pihak tersebutlah kebijakan yang ditujukan untuk mengalokasikan nilai-nilai (ekonomi, pendidikan, kesehatan dan yang lain) akan dibuat dan diperuntukan kepada masyarakat luas.

G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistemologi penelitian. Yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian.²⁶

²⁵ Miriam Budiardjo. Op. Cit. hlm. 368.

²⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi penelitian sosial* (Jakarta: PT. Bumi aksara, 2011) hlm. 41.

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Oleh karena itu, penelitian ini disebut metode kualitatif. Metode kualitatif lebih berdasarkan pada kualitatif studi kasus. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Responden dalam metode penelitian kualitatif berkembang terus (*snowball*) secara bertujuan (*purposive*) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan. Adapun dalam penelitian ini yang digunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.²⁷

2. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan di kantor Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan kantor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang ada di kota Palembang. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan karena peneliti ingin fokus pada strategi yang dilakukan oleh partai politik Islam (PPP) dan partai politik nasional (PDIP) di kota Palembang.

²⁷ *Ibid.* hlm. 78.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini peneliti membagi dua komponen yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer pada penelitian ini berasal dari wawancara dengan pimpinan atau anggota dari partai Persatuan Pembangunan dan partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
- b. Data Sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, artikel, jurnal, ilmiah dan undang-undang.²⁸

4. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data dan informasi berdasarkan fakta, maka peneliti dalam penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Teknik wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan dua orang atau lebih. Keuntungan dari wawancara yaitu untuk mendapatkan data pribadi, tidak terbatas pada pendidikan, asalkan responden dapat berbicara dengan baik saja. Selain itu dapat dijadikan pelengkap teknik pengumpulan data lainnya, sebagai penguji terhadap data-data yang didapat dengan teknik pengumpulan data lainnya. Data yang diperoleh melalui wawancara secara

²⁸ Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&B*, hlm. 218.

langsung dengan ketua atau anggota dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

- b. Dokumentasi merupakan suatu teknik atau cara dalam mengumpulkan data dengan berbentuk tulisan, gambar atau dokumentasi dari kantor Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di kota Palembang.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.²⁹

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data lapangan model Miles dan Huberman, langkah-langkah analisis data model Miles dan Huberman yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti : merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya

²⁹ Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&B* (Bandung: Alfabeta, 2015) hlm. 244.

dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data bias dibantu dengan alat elektronik seperti: komputer, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Model data (*Data display*)

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah menampilkan data. Display data dalam penelitian kualitatif bias dilakukan dalam bentuk: uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Miles dan Huberman (1984) menyatakan : “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narativetex*” artinya : yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, display data dapat juga berupa grafik, matriks, *network* (jejaring kerja).

3. Penarikan/verifikasi Kesimpulan (*Concluding drawing/verification*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran

suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.³⁰

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang akan dibahas dalam skripsi ini untuk mempermudah dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan ini, maka penulis menjelaskan dalam sistematika penulisan secara garis besar yang terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI. Bab ini berisi tentang kerangka teori untuk mengetahui sejarah singkat, strategi, struktur keanggotaan serta visi dan misi dari partai politik Islam (PPP) dan partai politik nasional (PDIP) di kota Palembang.

BAB III : PENYAJIAN ANALISIS DATA. Bab ini berisi tentang penyajian dan pembahasan data yang diperoleh serta menganalisis data dan fakta yang ada mengenai strategi dari partai politik Islam (PPP) dan partai nasional (PDIP) di kota Palembang dengan menganalisis menggunakan kerangka teori yang digunakan penulis, untuk memecahkan masalah yang akan diteliti.

BAB IV : PENUTUP. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang diperoleh.

³⁰ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. (Jakarta: Raja Grafindo. 2010).

BAB II

PPP dan PDIP (Trajektori Politik dan Historisitas)

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Pengelompokan dalam 3 golongan baru terjadi pada tahun 1973. 4 partai Islam, yaitu Nahdatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Sarekat Islam Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Selain dari itu, 5 partai yaitu Partai Murba dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Dengan demikian mulai pemilihan umum 1977 hanya ada 3 orsospol, yaitu PPP, PDI dan Golkar. Langkah berikutnya untuk menata sistem kepartaian adalah konsep Pancasila sebagai satu-satunya asas. Hal itu merupakan pelaksanaan dari gagasan yang telah dikemukakan oleh Presiden Soeharto dalam pidatonya di depan sidang paripurna DPR 16 Agustus 1982. Maksudnya agar tidak terjadi lagi penyimpangan seperti masa lalu atau persaingan antara partai karena tiap partai cenderung menonjolkan dan memperjuangkan asas mereka masing-masing.³¹

Dengan demikian proses penyederhanaan partai yang telah dimulai pada zaman Demokrasi Terpimpin akhirnya terlaksana secara efektif pada zaman Demokrasi Pancasila dengan 3 partai yang berasas Pancasila. Mulai dengan pemilihan umum 1982 sampai dengan pemilihan umum 1987, Golkar selalu menunjukkan kenaikan. Hanya ada pemilihan umum 1992, Golkar mengalami kemunduran. Akan tetapi, pada pemilihan umum 1997, Golkar memang besar-

³¹ Prof. Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik edisi revisi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama, 2008) hlm. 446.

besaran. Kemenangan-kemenangan ini antara lain disebabkan karena diberlakukannya masa mengambang serta intervensi aparaturnegara secara berlebih-lebihan.³²

TABEL. 1

Hasil Pemilu Orde Baru 1977-1997

Partai	1977	1982	1987	1992	1997
Golkar	232	242	299	282	325
PPP	99	94	61	62	89
PDI	29	24	40	50	11
Total	360	360	400	400	425

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah sebuah partai politik di Indonesia. Pada saat pendeklarasiannya pada tanggal 15 Januari 1973, partai ini merupakan hasil gabungan dari 4 partai keagamaan, yaitu Partai Nahdatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Perti dan Parmusi. Ketua sementara saat itu adalah Mohammad Syafa'at Mintaredja. Penggabungan keempat partai keagamaan tersebut bertujuan untuk penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dalam menghadapi pemilihan umum pertama pada masa Orde Baru tahun 1973. PPP sudah mengikuti sebanyak 6 kali sejak tahun 1977 sampai pemilu dipercepat tahun 1999 dengan hasil yang fluktuatif, turun naik.³³

³² *Ibid.* hlm. 446-447.

³³ Syamsuddin Haris, *PPP dan Politik Orde Baru* (Jakarta: PT. Grasindo, 1991) hlm. 112-113.

TABEL. 2**Hasil Perolehan Suara dari PPP pada Pemilu 1977-2009**

PPP	1977	1982	1987	1992	1997	1999	2004	2009
Perolehan Suara (Persentase)	18.745.565 (29,29%)	20.871.800 (27,78%)	13.701.428 (15,97%)	16.624.647 (14,59%)	25.340.018	11.329.905 (10,71%)	9.248.764 (8,14%)	5.500.000 (32%)
Perolehan Kursi (Persentase)	99 Kursi (27,12%) dari 360 Kursi	94 Kursi (26,11%) dari 364 Kursi	61 Kursi (15,25%) dari 400 Kursi	62 Kursi (15,50%) dari 400 Kursi	89 Kursi (20,94 %) dari 425 Kursi	58 Kursi (12,55%) dari 462 Kursi	58 Kursi (10,54 %) dari 550 Kursi	38 Kursi dari 550 Kursi

A. Program dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Program perjuangan dari PPP merupakan garis-garis besar perjuangan partai yang mencakup ideologi, latar belakang sejarah, hakikat dan kaidah perjuangan, jati diri partai, cita-cita politik dan visi perjuangan serta program strategis partai secara garis besar untuk mewujudkan tujuan dan usaha partai secara garis besar untuk mewujudkan tujuan dan usaha partai sebagaimana tersebut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPP dalam rangka berperan aktif mewujudkan tujuan nasional seperti yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Program perjuangan PPP ini disusun setelah mencermati perubahan lingkungan strategis dan kondisi objektif partai

yang merupakan cerminan reorientasi, redefinisi dan reposisi partai dalam rangka peningkatan, penyempurnaan dan pembaharuan dari program perjuangan PPP sebelumnya.³⁴

Secara internal, sasarannya diarahkan pada upaya pemantapan PPP sebagai partai politik yang demokratis, sehat, bersatu, mandiri, berkualitas, memiliki kemampuan daya saing untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam kehidupan politik nasional sehingga akan meningkatkan perannya sebagai kekuatan sosial politik dalam pembangunan nasional dan pengembangan kehidupan demokrasi di Indonesia. Sedangkan sasaran eksternalnya adalah semakin memantapkan peran strategis partai dalam menyukseskan pembangunan nasional menuju terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dalam panduan moral Islam melalui kemampuan partai dalam menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan negara, sekaligus menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.³⁵

a. Ideologi

PPP berpendapat bahwa Islam sebagai syari'at terakhir yang diturunkan Allah SWT kepada umat manusia di muka bumi adalah suatu kebenaran mutlak yang mengandung tuntunan kebajikan yang bersifat universal serta meliputi seluruh aspek kehidupan dan berlaku sepanjang masa. Islam sebagai agama (*ad-dien*) mengandung nilai kebenaran absolut karena ajarannya diturunkan oleh Allah

³⁴ <http://dpc-ppp-plg.blogspot.co.id/2012/10/khittah-dan-program-perjuangan-ppp.html?m=1> (Diakses pada tanggal 9 November 2017).

³⁵ <http://dpc-ppp-plg.blogspot.co.id/2012/10/khittah-dan-program-perjuangan-ppp.html?m=1> (Diakses pada tanggal 9 November 2017).

SWT kepada umat manusia untuk memuliakan martabat kemanusiaan pada derajat yang paling sempurna di antara ciptaan-Nya. Islam sebagai *ad-dien* merupakan sekumpulan perintah dan larangan (*syari'at*) yang mengandung tuntunan kebajikan bertujuan menebarkan kedamaian dan kasih sayang untuk sekalian alam semesta (*rahmatan lil 'alamiin*). PPP menyadari bahwa kemajemukan dan keragaman umat Islam dalam pikiran dan paham keagamaan merupakan rahmat bagi umat yang harus diterima sebagai pelangi dinamika untuk mencapai kebenaran hakiki. Sebab sikap menghormati berbagai perbedaan pikiran dan pandangan merupakan *wasilah* bagi terbentuknya kehidupan kolektif yang dilandasi semangat persaudaraan (*ukhuwah*), tolong menolong (*ta'awun*) dan toleransi (*tasamuh*).³⁶

PPP menyadari bahwa kemajemukan dan keragaman umat Islam dalam pikiran dan paham keagamaan merupakan suatu yang wajar, sebagai konsekuensi dari pranata ijtihad yang memungkinkan terjadinya perbedaan. Untuk hal tersebut sikap yang merasa hanya pendapatnya sendiri yang paling benar serta cenderung menyalahkan pendapat orang lain dan menolak dialog merupakan sikap yang bertentangan dengan prinsip toleransi (*tasamuh*). Sikap itu juga merupakan egoisme (*ananiyyah*) dan fanatisme kelompok (*ananiyyah hizbiyyah*) yang berpotensi mengakibatkan saling permusuhan (*al-'adawah*), pertentangan (*al-tanazu'*) dan perpecahan (*al-insyiqaq*). PPP harus menyadari bahwa sebagai partai

³⁶ <http://dpc-ppp-plg.blogspot.co.id/2012/10/khittah-dan-program-perjuangan-ppp.html?l=1> (Diakses pada tanggal 9 November 2017).

yang membawa ideologi Islam memiliki beban dan tanggung jawab yang sangat besar untuk menjaga kehormatan dan *marwah* agama Islam.³⁷

b. Program Perjuangan

PPP memiliki kehendak kuat untuk selalu mendorong percepatan transformasi menyeluruh di semua aspek kehidupan, baik dalam dimensi sistem maupun mentalitas dan kultur serta memperjuangkan pemenuhan hak-hak dasar manusia yaitu hak sebagai manusia merdeka, hak atas keyakinan beragama dan tidak adanya pemaksaan dalam agama, hak atas penghidupan, pekerjaan, nafkah, pangan, sandang dan papan, hak atas keselamatan jiwa dan bebas dari penganiayaan, perusakan dan penodaan, hak mendayagunaan akal pikiran serta kebebasan berkreasi, berekspresi, berpendapat dan berorganisasi, hak atas kepemilikan harta benda yang sah, hak untuk berketurunan dan menjaga kelangsungan generasi serta suasana yang kondusif bagi pengembangan jati diri dan kepribadian manusia.³⁸

PPP senantiasa berkomitmen dan bertekad meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia, terutama aspek penguatan kelembagaan, mekanisme dan praktik politik yang demokratis melalui upaya³⁹:

a) Mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dan bela negara;

³⁷ <http://dpc-ppp-plg.blogspot.co.id/2012/10/khittah-dan-program-perjuangan-ppp.html?m=1> (Diakses pada tanggal 9 November 2017).

³⁸ <http://dpc-ppp-plg.blogspot.co.id/2012/10/khittah-dan-program-perjuangan-ppp.html?m=1> (Diakses pada tanggal 9 November 2017).

³⁹ <http://dpc-ppp-plg.blogspot.co.id/2012/10/khittah-dan-program-perjuangan-ppp.html?m=1> (Diakses pada tanggal 9 November 2017).

- b) Pendidikan demokrasi tentang kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul serta berorganisasi termasuk kebebasan pers yang bertanggung jawab;
- c) Peningkatan kualitas dan kecepatan pelayanan publik termasuk peningkatan wawasan, ketrampilan dan kesejahteraan aparatur negara dan pelayanan publik serta reformulasi otonomi daerah untuk mencapai pelayanan publik yang memuaskan;
- d) Mendorong pembuatan berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan akses yang sama terhadap berbagai sumber daya ekonomi dan produksi bagi rakyat, menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap demokrasi, kebangsaan dan keadilan sosial, persamaan dan perlindungan hak politik warga negara dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam menempati jabatan-jabatan publik di seluruh wilayah RI;
- e) Mendorong reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik sebagai pintu masuk bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin.

B. Agenda dan Strategis Perjuangan

1. Kaderisasi

Kaderisasi dalam partai adalah salah satu aktivitas utama yang menandakan keberlanjutan kehidupan partai. Kaderisasi merupakan salah satu media rekrutmen, pemantapan komitmen dan ideologi politik, pengembangan kapasitas personal dan penguatan kelembagaan partai yang berorientasi jangka panjang. Tanpa kaderisasi, partai bagaikan organisme yang sulit untuk bernafas apalagi untuk memproduksi. Akibatnya cepat atau lambat bakal musnah karena tidak ada

regenerasi. Kader merupakan ‘aparatur ideologi partai’ atau agen ideologi partai yang menterjemahkan kepentingan masyarakat sekaligus memperjuangkan keterwujudannya. Oleh karena itu, kaderisasi partai harus dipandang sebagai upaya merubah potensi-potensi partai menjadi kekuatan nyata yang akan memperkokoh eksistensi partai di tengah masyarakat.⁴⁰

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sistem kaderisasi sebagai berikut⁴¹:

- a) Kaderisasi di PPP perlu dilakukan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan, baik kaderisasi formal, informal dan non formal serta dilakukan secara terpadu. Kaderisasi perlu dibarengi dengan program Kartu Tanda Anggota secara nasional yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen DPP PPP. Masing-masing Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya dapat memberikan nilai tambah pada KTA PPP melalui pemberian asuransi jiwa, asuransi kesehatan dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Dewan Pimpinan;
- b) Proses-proses politik dan partisipasi seseorang dalam kegiatan atau tugas-tugas kepartaian harus diletakkan sebagai bagian dari kaderisasi. Oleh karenanya perlu dibangun budaya dan lingkungan (*milieu*) politik yang kondusif dan bisa memberi stimulan bagi para kader dan semua insan partai untuk berproses menjadi kader partai yang militan, berdaya saing tinggi dan bermoral (*berakhlaqul karimah*);

⁴⁰ <http://dpc-ppp-plg.blogspot.co.id/2012/10/khittah-dan-program-perjuangan-ppp.html?m=1> (Diakses pada tanggal 9 November 2017).

⁴¹ <http://dpc-ppp-plg.blogspot.co.id/2012/10/khittah-dan-program-perjuangan-ppp.html?m=1> (Diakses pada tanggal 9 November 2017).

- c) Kaderisasi dilakukan dengan menggunakan sistem 'keagenan kader', yakni harus selalu tersedia kader militan dan berdaya saing tinggi yang menjadi simpul dan motor penggerak partai pada setiap jenjang organisasi partai dan jenjang komunitas dalam masyarakat.
- d) Untuk kepentingan kebesaran partai, PPP harus menetapkan sistem rekrutmen kader yang potensial, baik dari segi kapasitas personal maupun pengaruh sosial dan politik.
- e) Disamping mengembangkan kapasitas kader, PPP harus mendorong, mempromosikan dan memfasilitasi kader-kader partai agar dapat berperan tidak hanya di lembaga-lembaga politik tetapi juga di bidang-bidang ekonomi (usaha), sosial, budaya dan kerja-kerja advokasi untuk memperkokoh eksistensi kader-kader partai di tengah masyarakat. Kader-kader PPP juga harus bisa ditempatkan pada posisi-posisi strategis di luar kelembagaan politik. Dengan demikian, kader-kader partai akan tersebar di berbagai bidang kehidupan.
- f) Terkait dengan program kaderisasi formal, PPP harus menyempurnakan buku tentang sistem dan pola pengkaderan yang berkualitas baik dari segi aspek penjenjangan, peningkatan keahlian, metode dan kurikulum dalam rangka menghasilkan kader-kader partai yang berkualitas, berdaya saing tinggi, militan, ideologis dan responsif terhadap perkembangan yang terjadi.
- g) Disamping itu, PPP akan terus melakukan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam rangka penguatan fungsi kaderisasi dan rekrutmen kader

yang berkualitas dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai dan ideologi partai.

2. Membangun Citra Partai

Disamping karena peran dan pengabdianya, eksistensial dan kebesaran partai sangat ditentukan oleh citra dan performennya di mata masyarakat luas (publik). Demikian juga citra, eksistensi dan masa depan PPP ditentukan juga oleh kemampuannya mengelola momentum politik dan melakukan artikulasi politik yang mencerminkan dirinya sebagai partai yang visioner, mempunyai integritas politik dan mampu memberikan harapan-harapan (*expectation*) bagi masyarakat luas tentang pembangunan bangsa ke depan. Sebagai partai Islam, PPP juga harus mempertegas identitas keIslamannya, yakni yang bercorak keIndonesiaan dan keumatan yang mencerminkan corak keIslaman masyarakat Indonesia dan berorientasi pengabdian pada kepentingan umat. PPP harus tampil dengan *image building* partai yang kuat dan berkarakter, membangun hubungan yang erat dengan jaringan media serta sikap politik dan platform yang tegas dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Dengan cara ini, PPP akan memperoleh citra positif, memberikan harapan dan mengesankan sebagai partai yang menjanjikan masa depan. Dengan demikian PPP diharapkan memperoleh kepercayaan rakyat bukan sebagai partai masa lalu yang ditinggalkan rakyat.⁴²

PPP menyadari bahwa partai ini tidak dewasa dalam memiliki dan menguasai media masa. Karena itu perlu ditempuh berbagai alternatif metode atau cara yang memungkinkan sikap dan garis partai dapat diketahui oleh masyarakat

⁴² <http://dpc-ppp-plg.blogspot.co.id/2012/10/khittah-dan-program-perjuangan-ppp.html?l=1> (Diakses pada tanggal 9 November 2017).

luas. Ini memerlukan kiat-kiat cerdas dengan memanfaatkan berbagai momentum strategis, peristiwa yang hangat dan berbagai forum yang tersedia. Untuk itu, hubungan baik dengan berbagai media masa, baik media cetak maupun elektronik terutama para jurnalis dan wartawan merupakan suatu yang bersifat niscaya. PPP akan melakukan berbagai usaha dan kegiatan dengan meningkatkan pendayagunaan media masa dan sarana komunikasi sosial lainnya sebagai media untuk menyebarkan pemikiran atau gagasan, program kegiatan partai untuk lebih meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perjuangan partai.⁴³

C. Strategi Implementasi

Untuk melaksanakan seluruh program perjuangan PPP sebagaimana diuraikan di atas, diperlukan strategi implementasi yang sesuai dengan kondisi obyektif di lapangan dan kecenderungan perkembangan ke depan. Oleh karena itu, diperlukan beberapa langkah strategis yang perlu dijadikan acuan,⁴⁴ yaitu:

1. Penguatan fungsi kelembagaan;
2. Menentukan prioritas program;
3. Ideologisasi dalam gerakan partai;
4. Silaturahmi sebagai model gerakan;
5. Kepemimpinan dan pola pengendalian pelaksanaan program;
6. Kerja sama dengan kelompok-kelompok strategis.

⁴³ <http://dpc-ppp-plg.blogspot.co.id/2012/10/khittah-dan-program-perjuangan-ppp.html?m=1> (Diakses pada tanggal 9 November 2017).

⁴⁴ <http://dpc-ppp-plg.blogspot.co.id/2012/10/khittah-dan-program-perjuangan-ppp.html?m=1> (Diakses pada tanggal 9 November 2017).

D. Program Pemenangan Pemilu

Program pemenangan pemilu PPP memiliki tujuan⁴⁵:

1. Sukses meningkatkan dukungan politik rakyat dimana pada pemilu 2014 ditargetkan akan memperoleh 10% suara dan menjadi 3 besar partai dengan dukungan politik terbanyak.
2. Sukses menempatkan kader-kader terbaiknya pada jabatan legislatif dan eksekutif.
3. Sukses meningkatkan konsolidasi partai hingga tingkat desa.

E. Visi dan Misi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

1. Visi

Berdasarkan sejarah perjuangan dan jati diri, maka visi PPP adalah “Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman”.⁴⁶

2. Misi

- a. PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan dan konflik sosial

⁴⁵ <http://dpc-ppp-plg.blogspot.co.id/2012/10/khittah-dan-program-perjuangan-ppp.html?m=1> (Diakses pada tanggal 9 November 2017).

⁴⁶ <http://ppp.or.id/page/visi-dan-misi-ppp.html> (Diakses pada tanggal 28 November 2017).

yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang ber-bhineka tunggal mika.

- b. PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni serta kesewenang-wenangan yang mendzalimi rakyat.
- c. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhai oleh Allah SWT. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dibentuk pada 10 Januari 1973. Pembentukan PDI sebagai hasil fusi dari 5 parpol yang berpaham atau berideologi nasionalisme, marhaenisme, sosialisme, kristen protestan dan kristen katolik. Kelima partai yang bergabung adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Murba, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katholik. Sejak PDI dibentuk terus-menerus mengalami kemelut intern. Terutama dengan peristiwa yang menimbulkan konflik dikalangan elit kepemimpinan partai yang berasal dari unsur PNI. Akibatnya,

sejak pemilihan umum 1971 yang pertama pada masa Orde Baru sampai pemilu 1982 yang ketiga, perolehan suara PDI selalu mengalami penurunan. Pada pemilu 1971 dengan 5 partai yang bergabung dalam PDI diperoleh 9,3% dari seluruh jumlah suara pemilih yang sah. Pada pemilu 1977, PDI memperoleh 8,6% suara dan pada pemilu 1982 menjadi 7,9%.⁴⁷

Pada masa Orde Baru, pamor partai Islam mulai meredup karena adanya berbagai tekanan baik secara internal maupun eksternal partai. Kondisi tersebut disinyalir terjadi atas pengaruh dari kebijakan yang dibuat oleh Presiden Soeharto, yakni merasionalisasi partai politik. Keberadaan PPP yang bernetabene sebagai perwakilan partai Islam di masa itu dirasati tidak cukup mampu mewakili kepentingan masyarakat dan memiliki ruang gerak terbatas hingga kurang mampu menunjukkan kinerjanya pada rakyat. Di sisi lain, reformasi 1998 secara nyata membawa perubahan yang cukup signifikan bagi sistem sosial politik di Indonesia. Masa tersebut menjadi satu titik awal perubahan setelah tergulirnya pemerintahan otoriter Presiden Soeharto selama 32 tahun. Salah satu elemen yang terkena dampak dari reformasi itu sendiri adalah partai politik khususnya partai politik berideologikan Islam. Perubahan pun kembali terjadi pasca reformasi, masyarakat Indonesia pada masa itu cenderung lebih dinamis dan partai Islam pada akhirnya semakin tenggelam dengan proses politik yang tersekulerisasi. Politik aliran tidak lagi memiliki kekuatan untuk mendominasi situasi dan

⁴⁷ Adriana Elisabeth Sukamto, dkk., *PDI dan prospek pembangunan politik* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 1991) hlm. 1-3.

kemunduran eksistensi partai Islam pun menjadi suatu hal yang dirasa menarik untuk dianalisa secara mendalam.⁴⁸

Sejarah panjang PDI Perjuangan yang telah mengalami secara langsung berhadapan dengan rezim otoriter Orde Baru membuat parpol ini berbeda dengan parpol yang lainnya. PDI Perjuangan muncul sebagai pelopor perubahan sistem politik yang semakin demokratis dengan menggantikan pemerintahan otoriter Orde Baru. Diawali tahun 1927, sesuai menyelesaikan pendidikan bersama anak-anak muda jaman itu, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai wadah kelompok-kelompok nasionalis Indonesia. Partai itu terus berkembang dan berjuang memerdekakan Indonesia hingga turut menyokong Soekarno menjadi Proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia. Pada pemilu 1955, PNI ikut berkompetisi dan memenangkannya, namun harus dilebur ke dalam PDI menyusul kebijakan rezim Orde Baru pimpinan Soeharto 1971. Ditekan habis-habisan sejak awal dekade 1990-an karena munculnya Megawati Soekarno Putri sebagai pemimpin alternatif, partai itu pun sempat pecah. Namun, Megawati cepat menyatukannya di bawah bendera PDI Perjuangan.⁴⁹

A. Identitas Partai

Sejak UU nomor 3 dan nomor 8 tahun 1985, diberlakukan bagi sebagian kalangan disebut sebagai “tahap awal pembaruan politik di Indonesia”, maka di negara ini tidak lagi berideologi yang lain kecuali ideologi Pancasila. Ketentuan itu muncul sebab kedua undang-undang tersebut menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal bagi semua orsospol dan ormas. Ketetapan ini tampaknya tidak

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 5-7.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 7-9.

menjadi masalah bagi Golkar. Namun, tidak demikian bagi orsospol seperti PDI dan PPP. Akan tetapi, tidak berarti kedua orsospol menjadi “ragu-ragu” untuk menerapkan Pancasila sebagai ideologi parpol. Pemilu 1987 merupakan pemilu yang pertama kali bagi ketiga orsospol yang telah menganut ideologi yang sama, yaitu Pancasila. Akan tetapi, pelaksanaan ketetapan terutama jika dilihat dari tema-tema dan suasana kampanye pemilu 1987, kedua orsospol masih dibayangi dengan “ideologi lama”. Dalam hal ini, PPP secara resmi telah menanggalkan ideologi Islam, namun partai ini masih mengklaim sebagai “partainya orang-orang Islam”. Kejadian yang serupa dialami pula oleh PDI.⁵⁰

Pada pemilu yang lalu, PDI masih dibayangi dengan kebesaran nama dari tokoh kharismatik Bung Karno. Bahkan faktor Soekarno, Presiden pertama RI (1945-1967) menjadi salah satu penentu keberhasilan PDI dalam setiap kampanye. Kesuksesan yang pada gilirannya dapat menaikkan perolehan suara PDI. Jika PPP tampaknya masih menggunakan Islam sebagai identitas partai (bukan ideologi partai), mengingat basis sosial pendukung PPP adalah umat Islam, maka pertanyaannya “apakah PDI juga tetap mempertahankan Bung Karno sebagai “identitas” partai?” Sebagaimana diketahui, PPP merupakan hasil fusi dari 4 parpol yang mempunyai ideologi atau asas yang sama, yakni Islam. Akan tetapi berbeda dengan PPP, maka PDI merupakan hasil fusi dari 5 parpol dengan ideologi atau asas yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. PNI menganut paham marhaenisme-nasionalisme, IPKI berpaham nasionalisme, Partai Murba menganut ideologi sosialisme, Parkindo dan Partai Katholik menganut paham

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 69.

keagamaan (Kristen dan Katholik). Setelah kelima parpol berfusi ke dalam PDI pada 10 Januari 1973, asas atau ideologi setiap unsur “dilebur”. Kemudian secara yuridis-formal, PDI mencoba untuk rumuskan “identitas-nya” sebagai tercantum dalam Anggaran Dasar, yaitu “berwatak dan bercirikan Demokrasi Indonesia, Kebangsaan Indonesia dan Keadilan Sosial”.⁵¹

Dalam praktek, bila diamati dari tingkah laku politik selama pemilu 1977, 1982 dan 1987, PDI seakan-akan “mengambil alih” identitas yang dimiliki PNI, misalnya dari segi lambang partai, PDI menggunakan gambar kepala banteng sebagaimana yang pernah dipakai oleh PNI (meskipun dalam bentuk yang berbeda). Begitu pula dalam identitas warna (merah dan hitam) dan simbol-simbol (seperti Bung Karno), semuanya menimbulkan kesan bahwa PDI adalah penjelmaan dari PNI. Atribut partai itu dapat dimengerti mengingat PNI merupakan unsur yang paling dominan di dalam tubuh PDI, terutama terlihat dari hasil perbandingan dari jumlah suara yang diraih kelima partai (PNI, Parkindo, Partai Katholik, IPKI dan Murba) pada pemilu 1971 atau 2 tahun sebelum mereka berfungsi ke dalam PDI. Selain itu, sejarah atau perjalanan kehidupan politik di Indonesia, pada pemilu 1955 menyatakan PNI pernah tercatat sebagai parpol yang terbesar.⁵²

Meskipun demikian, satu hal yang sulit dibantah dengan menampilkan anggota keluarga Bung Karno, yaitu Megawati Soekarnoputri dan Guruh Soekarnoputra dalam kampanye pemilu, maka PDI sebenarnya secara sengaja berusaha membangkitkan kembali simpati masyarakat kepada Bung Karno. Tentu

⁵¹ *Ibid.* hlm. 69-70.

⁵² *Ibid.* hlm. 70.

saja terlepas dari apakah partisipasi anggota keluarga Bung Karno dapat atau tidak ditafsirkan sebagai upaya membangkitkan kembali Soekarnoisme atau sebagaimana telah disinggung sekedar memanfaatkan tokoh kharismatik Bung Karno untuk tujuan-tujuan politik sesaat. Dalam kaitan dengan masalah identitas partai ini terdapat beberapa kemungkinan yang memberikan peluang bagi PDI⁵³:

Pertama, yang menonjolkan dimensi Persatuan Indonesia; sila ketiga dari Pancasila sebagai identitas partai. Dimensi ini masih mempunyai kaitan erat dengan paham nasionalisme, namun kecil kemungkinannya bagi munculnya kecurigaan atau “iri hati” terhadap mereka yang pernah mendukung dari 2 unsur partai nasrani.

Kedua, yang menonjolkan dimensi sila keempat (kerakyatan) sebagai identitas partai. Dimensi ini sesuai dengan apa yang tampaknya menjadi program utama PDI, yaitu demokratisasi, sebagaimana tercermin dari motto kampanye pada pemilu 1987: “Pancasila Identitasku, Demokrasi Programku, Indonesia Wawasanku”. Dimensi sila kerakyatan juga sesuai dengan nama partai, yakni Partai Demokrasi Indonesia.

Ketiga, yang menonjolkan dan mengembangkan dimensi sila kelima (keadilan sosial). Dimensi ini sesuai dengan komitmen PDI terhadap kepentingan rakyat kecil. Sebagaimana diketahui, selama ini PDI selalu mengidentifikasi sebagai “partai miskin” atau “partai rakyat kecil”. Pengidentifikasian semacam itu terbukti cukup berhasil sebagai salah satu sarana penarik masa, khususnya golongan masyarakat “kelas bawah” pada masa kampanye pemilu 1987.

⁵³ *Ibid.* hlm. 73-74.

Keempat, yang menonjolkan dan mengembangkan dimensi sosio-nasional-demokrasi sebagai identitas partai. Dengan kata lain penonjolan ini merupakan penggabungan dari dimensi-dimensi sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan dan sila keadilan sosial. Kenyataan ini juga sesuai dengan keterangan yang pernah dicoba dirumuskan PDI sebagai “identitas” partai, yaitu bahwa PDI berwatak dan bercirikan demokrasi Indonesia, kebangsaan Indonesia dan keadilan sosial.

B. Kemandirian dan Demokratisasi

Sistem kepartaian di Indonesia telah disederhanakan, mulai 10 orpol pada pemilu 1971 diubah menjadi 3 orsospol: PPP, Golkar dan PDI sejak 1973 sampai sekarang. Akan tetapi, kualitas kemandirian orsospol yang terkandung di dalamnya masih relatif rendah. Kenyataan ini disebabkan 2 faktor yang saling berkaitan antara satu dan yang lain. Kedua faktor yang berhubungan erat itu, yakni faktor intern dan faktor ekstern. Dari faktor intern disebabkan mekanisme demokrasi di dalam tubuh orpol belum lancar, sedangkan dari faktor ekstern disebabkan campur tangan birokrasi dalam kehidupan kepartaian dianggap masih kuat. Akibatnya meskipun Indonesia telah merdeka selama 40-an tahun yang lalu, parpol belum juga menjadi “dewasa”.⁵⁴

Partai politik secara umum menjalankan 8 fungsi,⁵⁵ yaitu:

1. Parpol merupakan salah satu sarana atau wadah untuk berpartisipasi politik;
2. Parpol berperan dalam proses merumuskan sejumlah kepentingan (perumusan atau artikulasi kepentingan);

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 74.

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 74-75.

3. Parpol berfungsi sebagai dalam penggabungan atau agregasi kepentingan asas sikap-sikap dan tuntutan-tuntutan dari berbagai kelompok yang adakalanya menyangkut kepentingan yang sama;
4. Parpol berfungsi sebagai sarana komunikasi informasi, isu dan gagasan politik, dalam hal ini parpol sering juga disebut sebagai perantara (*broker*) antara pemerintah dan masyarakat;
5. Parpol berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik, di negara-negara yang berkembang parpol dapat membantu peningkatan identitas nasional dan pemupukan integrasi nasional;
6. Parpol berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik, yaitu mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik;
7. Parpol dapat memainkan peranan sebagai sarana pengatur konflik, dalam hal ini parpol berfungsi untuk mengeliminir konflik-konflik yang terjadi di masyarakat, baik yang disebabkan faktor-faktor primordialisme maupun karena terdapatnya kesenangan sosial;
8. Parpol berfungsi sebagai pembuat kebijaksanaan (*decision maker*).

Sejak PDI dibentuk hingga saat ini, maka salah satu peristiwa yang menonjol adalah kegagalan partai ini untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Tradisi yang dikenal sebagai “budaya restu dari atas” selalu muncul setiap konflik intern terjadi di tubuh partai ini. Tampilnya generasi muda dalam jajaran kepemimpinan PDI dan keberhasilan mereka pada pemilu 1987 ternyata tidak menjamin peningkatan kualitas kemandirian partai ini. Kasus yang masih aktual

yang terjadi se usai pemilu 1987 adalah kegagalan Soerjadi dan kawan-kawan untuk menyelesaikan perkara “pembangkangan” 3 anggota DPR FPDI. Masalah itu baru dapat diselesaikan setelah ada campur tangan dari Menteri Dalam Negeri, Soepardjo Rustam. Waktu itu ironisnya “penyelesaian” kasus tersebut justru menimbulkan kesan ketidaktegasan DPP PDI di bawah kepemimpinan Soerjadi tatkala menetapkan aturan permainan yang dibuat sendiri. Peristiwa semacam itu terjadi karena ketiga anggota DPR FPDI yang terkena SK DPP PDI Nomor 59 tahun 1986 yang seharusnya tidak berhak lagi duduk sebagai anggota DPR dan akhirnya tetap menjadi anggota dewan yang terhormat itu.⁵⁶

Sementara itu, berdasarkan faktor ekstern, keterlibatan birokrasi yang cukup kuat dengan sejumlah permasalahan yang dihadapi PDI tidak terlepas dari 3 hal⁵⁷:

1. *Pertama*, pada umumnya berkaitan dengan kondisi lingkungan sistem politik di Indonesia yang masih menonjolkan dimensi preventif.
2. *Kedua*, adanya kenyataan bahwa pemerintah (dalam hal ini menteri dalam negeri) bertindak sebagai pembina orsospol dan ormas.
3. *Ketiga*, ketergantungan parpol pada dana pemerintahan dengan sendirinya dari segi ekonomis saja, parpol sudah tidak mandiri.

C. Rekrutasi dan Kaderisasi

Salah satu fungsi parpol sebagai sarana rekrutmen politik, yaitu mencari anggota-anggota yang baru dan mengajak mereka yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dalam hal ini, rekrutasi atau rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai serta sekaligus merupakan

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 75-76.

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 76.

salah satu cara untuk menyeleksi calon-calon pemimpin. Dengan demikian, berarti masalah rekrutasi atau rekrutmen politik berkaitan erat dengan masalah kaderisasi dan partisipasi politik. Secara umum, bila rekrutasi menyangkur soal proses pencarian anggota-anggota yang baru dari suatu parpol, maka kaderisasi atau sering juga disebut sebagai rekrutasi elite politik, lebih menitikberatkan pada masalah proses mencari dan mempersiapkan mereka yang akan tampil sebagai pemimpin (elite) politik termasuk di dalamnya pemimpin-pemimpin parpol.⁵⁸

Pada umumnya dapat disimpulkan, semakin lama partisipasi politik maka dirasakan di kalangan masyarakat semakin meluas. Menurut Prof. Myron Weiner ada 5 hal yang menyebabkan partisipasi politik di kalangan masyarakat semakin meluas. Kelima hal yang dimaksud adalah modernisasi, perubahan-perubahan struktur kelas sosial, pengaruh kaum cendekiawan dan komunikasi masa modern, konflik diantara kelompok-kelompok pemimpin politik serta keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Di samping itu tingkat keaktifan yang tinggi dan rendah bagi seseorang untuk berpartisipasi politik dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti pendidikan tinggi, status sosial ekonomi dan keanggotaan dalam parpol.⁵⁹

Akan tetapi, pada hakikatnya perihal rekrutasi dan kaderisasi setiap parpol (dan organisasi-organisasi yang lain) mempunyai cara-cara dan pola sendiri. Selama ini, PDI dapat dikatakan tidak mempunyai pola-pola yang khusus guna mencetak kader. Rekrutasi dan kaderisasi yang berlaku di PDI berlangsung melalui bekas unsur-unsur pendukungnya. Kader-kader atau calon-calon

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 77-78.

⁵⁹ *Ibid.* hlm. 78.

pemimpin PDI diajukan oleh unsur-unsur atau ormas-ormas yang semula merupakan *onderbouw* unsur-unsur yang bersangkutan. Pelaksanaan yang sama terjadi juga pada partai yang lain, PPP misalnya. Mekanisme itu tampak sesuai dengan apa yang dikenal sebagai “pola aliran” yang mewarnai kehidupan kepartaian di Indonesia. Pola rekrutasi dan kaderisasi melalui bekas unsur dan ormas *onderbouw* biasanya dilakukan oleh partai-partai politik yang menganut sistem keanggotaan tidak langsung. Sedangkan sistem keanggotaan langsung dianut oleh partai-partai yang tidak mempunyai ormas *underbouw*. Dengan kata lain, keanggotaan parpol bersifat perorangan. Menurut sistem keanggotaan tidak langsung, maka ormas yang berfungsi merekrut anggota dan mencetak kader-kader kemudian “menyalurkannya” ke parpol. Sementara itu, pada sistem keanggotaan secara langsung, partai menggunakan ranting-ranting dan cabang-cabangnya sebagai unit organisasi terkecil untuk memelihara hubungan antara anggota dan partai yang sekaligus berfungsi melaksanakan rekrutasi dan kaderisasi.⁶⁰

PDI pun seperti telah diuraikan menganut sistem keanggotaan tidak langsung. Misalnya, mereka yang menduduki jabatan puncak (ketua umum DPP PDI) selalu berasal dari PNI dan bila ditelusuri lebih jauh ia berasal dari ormas *underbouw* PNI. Orientasi itu dapat bersumber dari ormas seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) atau Gerakan Pemuda Marhaen (GPM).

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 79.

Jabatan ketua umum DPP PDI merupakan “jatah” bagi mereka yang berasal dari unsur PNI, karena PNI merupakan unsur dominan atau terbesar di PDI.⁶¹

Secara umum, proses rekrutasi dan kaderisasi yang terjadi di dalam tubuh PDI berlangsung cukup lancar. Dengan kata lain, PDI cukup berhasil ketika melaksanakan rekrutasi dan kaderisasi. Aktivitas ini setidaknya terlihat dari komposisi anggota DPR-RI FPDI hasil pemilu 1987. Waktu itu dari 40 anggota DPR FPDI hanya 8 orang (20%) yang merupakan anggota lama atau hasil pemilu 1982. Pelaksanaan proses rekrutasi dan kaderisasi di PDI cukup berhasil, akan tetapi proses tersebut masih menggunakan pola-pola yang lama, yakni sistem keanggotaan tidak langsung. Adanya kedua UU Nomor 3 dan Nomor 8 tahun 1985, berarti secara yuridis-formal, PDI tidak lagi mempunyai kaitan dengan bekas unsur-unsur pendukung dan ormas-ormas *underbouw*-nya.⁶²

Meskipun tidak menutup kemungkinan ditetapkannya pola-pola yang lama, namun terdapat kecenderungan PDI juga berusaha memakai pola-pola yang baru. Misalnya, sebagian dari fungsionaris DPP PDI sekarang terdiri atas para pekerja profesional atau berlatar belakang akademis. Mereka sebelumnya kurang begitu dikenal di gelanggang politik nasional. Tidak heran bila ada media masa yang menulis: “...pimpinan baru PDI mengesankan sebuah pendekatan yang terlalu akademis dan idealistis”. Sehubungan dengan proses rekrutasi dan kaderisasi, DPP PDI juga berusaha lebih memfungsionalkan Departemen Kepemudaan dan Departemen Kewanitaan. Keputusan ini dimaksudkan sebagai pengganti kaderisasi dan rekrutasi melalui ormas-ormas yang pernah menjadi

⁶¹ *Ibid.* hlm. 79-80.

⁶² *Ibid.* hlm. 81 dan 83.

pendukungnya. Dengan kata lain PDI berusaha mengarah pada sistem keanggotaan langsung.⁶³

D. Program Menjelang Pemilu

Strategi kampanye yang dilakukan oleh PDIP melalui strategi manajemen Dapil (menempatkan caleg sebanyak banyaknya perdapil), PDIP mengambil caleg yang relatif telah teruji elektabilitasnya yang tinggi, seperti caleg yang relatif banyak berasal dari golongan pengusaha, pensiunan birokrat dan PNS seperti camat dan lain-lain yang sudah berpengalaman dan dekat selama ini dengan rakyat. PDIP menargetkan bila meraih suara terbanyak pada Pemilu Legislatif 2014. Untuk meraih target tersebut PDIP terus meningkatkan strategi dalam memenangkan pesta demokrasi 5 tahunan tersebut.⁶⁴

Untuk melaksanakan strategi ini, DPP PDIP mengumpulkan sebuah ketua DPC untuk membicarakan strategi-strategi kemenangan tersebut. Secara garis besar, strategi yang pihaknya melancarkan adalah menjauhi apa yang tidak disukai oleh rakyat. Sebagai analisis, hal yang tidak disukai rakyat adalah tindak korupsi, kejahatan, narkoba dan perbuatan yang dinilai cela oleh masyarakat. Dengan pertimbangan tersebut maka pihaknya menuntut para caleg yang diusung oleh partainya bisa menjadi figur yang baik di masyarakat. Jadi selain bisa menyampaikan solusi terbaik untuk kepentingan rakyat, ketua umum juga sudah menginstruksikan agar semua caleg PDIP tidak terlibat dalam korupsi, narkoba dan perbuatan tercela. PDIP memiliki strategi tersendiri agar PDIP menang pada Pemilu tahun 2014 dan pengaruh figur Jokowi lebih dominan pengaruhnya

⁶³ *Ibid.* hlm. 83.

⁶⁴ http://www.academia.edu/19782358/SKRIPSI_ENDA.pdf (Diakses pada tanggal 9 November 2017).

terhadap kemenangan PDIP lebih banyak menggunakan pengaruh figur Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta yang merupakan fraksi dari PDIP yang menjual politik santun, mengedepankan nasionalis dan religius serta gaya sederhana kepemimpinannya, setiap foto caleg selalu disamping gambar ada foto Jokowi. Door to door, dilakukan dengan cara caleg mendatangi langsung para pemilih, lebih dominan dilakukan oleh caleg PDIP pada pemilu legislatif 2014. Kerja DPP PDIP relatif tidak terlalu maksimal dan belum optimal, namun pengaruh figur Jokowi dan panitia internal pemilu membantu kerja-kerja partai dalam memenangkan pemilu legislatif 2014 di Indonesia.⁶⁵

E. Visi dan Misi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Bahwa sesungguhnya cita-cita luhur untuk membangun dan mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta berkeadilan dan berketuhanan sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 merupakan cita-cita bersama dari seluruh rakyat Indonesia.⁶⁶

1. Visi
 - a. Mewujudkan amanat penderitaan rakyat sebagaimana tercantum dalam cita-cita Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.
 - b. Menjaga dan melaksanakan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai dasar dan arah berbangsa dan bernegara, sebagai sumber inspirasi dan harapan bagi rakyat, sebagai norma pengatur tingkah laku kebijakan, kelembagaan dan anggota partai dan sebagai cermin dari keseluruhan jati diri partai.

⁶⁵ http://www.academia.edu/19782358/SKRIPSI_ENDA.pdf (Diakses pada tanggal 9 November 2017).

⁶⁶ http://elektabilitas.blogspot.co.id/2013/06/visi-misi-partai-demokrasi-indonesia_23.html?m=1 (Diakses pada tanggal 28 November 2017).

- c. Mengantarkan Indonesia untuk berdaulat dalam bidang politik, berdirikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai syarat-syarat minimum bagi perwujudan cita-cita bersama bangsa di atas.
2. Misi
 - a. Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
 - b. Membangun masyarakat Pancasila 1 Juni 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
 - c. Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat.
 - d. Memperjuangkan kepentingan rakyat di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya secara demokratis dan berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Menjadi alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa.
 - e. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
 - f. Menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.

- g. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun masyarakat Pancasila.
- h. Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara.

TABEL. 3

Hasil Perolehan Suara dari PPP dan PDIP pada Pemilu 2014

Nama Partai	Perolehan Suara (Persentase)	Perolehan Kursi (Persentase)
PPP	8.157.488 (6,53%)	39 kursi (6,96%)
PDIP	23.681.471 (18,95%)	109 kursi (19,46%)

BAB III

Hasil Penelitian

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

A. Struktur Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

TABEL. 4

**Nama Anggota LP2 (Lajna Pemenangan Pemilu) Dewan Pimpinan Cabang
(DPC) PPP Kota Palembang**

No	Nama	Jabatan
1	H. Syahril Edy, S	Ketua
2	Hasnul Amin	Sekretaris

Sumber: DPC Partai Persatuan Pembangunan kota Palembang

TABEL. 5

**Susunan dan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang (DPC)
PPP Kota Palembang Masa Bakti 2011-2016**

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Azhari Mawardi, MM	Ketua
2	H. Syahril Edi, SH	Wakil Ketua
3	H. Amiruddin Muslim	Wakil Ketua
4	Syamsul Bahirun, S.Pd.	Wakil Ketua
5	Desmana, Amd.	Wakil Ketua

6	Ahmad Zamhari, S.Pd., MM	Wakil Ketua
7	Rusman Effendi, S.IP	Wakil Ketua
8	Nurul Chotimah, S.Ag	Wakil Ketua
9	Euis Sundari, SH	Wakil Ketua
10	Hj. Jamilah, SH	Wakil Ketua
11	Ernan Satriahady, S.IP	Wakil Sekretaris
12	M. Syafriansyah, SP	Wakil Sekretaris
13	Abdul Karim	Wakil Sekretaris
14	Edwin Setia Budi, SH	Wakil Sekretaris
15	Hasnul Amin	Wakil Sekretaris
16	H. Herzil Imani Husin	Wakil Sekretaris
17	Ahmad Zaki Wahid Amrullah, ST	Wakil Sekretaris
18	M. Apri Zaini, SE, S.Ag.	Wakil Sekretaris
19	Yuliati, SH	Wakil Sekretaris
20	R. A. Nurul Aini, S.Ag.	Wakil Sekretaris
21	H. Taufiq Hidayat, BSc	Bendara
22	Yulilia Harlin, ST	Wakil Bendahara
23	Rosdiana, S.Pd.	Wakil Bendahara

Sumber: DPC Partai Persatuan Pembangunan kota Palembang

TABEL. 6

**Susunan dan Personalia Pimpinan Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan
Cabang (DPC) PPP Kota Palembang Masa Bakti 2011-2016**

No	Nama	Jabatan
1	H. M. Yunus H. Mansyur	Ketua
2	Ust. H. Habibi Al Hafiz	Wakil Ketua
3	Abdul Gofar AR	Wakil Ketua
4	RM. Zainudin Muhammad	Wakil Ketua
5	H. M. Bangun Sahraya, S.Kom.	Sekretaris

Sumber: DPC Partai Persatuan Pembangunan kota Palembang

TABEL. 7

**Susunan dan Personalia Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang
(DPC) PPP Kota Palembang Masa Bakti 2011-2016**

No	Nama	Jabatan
1	H. Muslim Abdullah, SH	Ketua
2	H. Taufik Hasnuri	Wakil Ketua
3	Umi Choiriati, SH	Wakil Ketua
4	Hauli Nawawi	Wakil Ketua
5	Ir. H. Jalaludin Arif	Sekretaris
6	Drs. Amirodi Winta	Wakil Sekretaris
7	Warman	Wakil Sekretaris

Sumber: DPC Partai Persatuan Pembangunan kota Palembang

B. Rekrutmen Caleg

Mekanisme perekrutan caleg yang dilakukan oleh PPP yaitu dengan cara melalui lembaga/badan yang telah dibuat oleh PPP yang dinamakan LP2 (Lajna Pemenangan Pemilu). Jadi LP2 sebagai panitia yang berada di bawah koordinasi DPC. LP2 mempunyai anggota sebanyak 5 orang yang disebut dengan rantap (panitia penetapan) dan 5 orang anggota tersebut terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan 2 pimpinan cabang yang lainnya. Para anggota dari LP2lah yang akan menentukan nomor urut caleg, selanjutnya setelah menentukan nomor urut caleg, DPC diminta untuk membuat surat rekomendasi ke DPP melalui DPW. Tugas dari LP2 sendiri⁶⁷ yaitu:

1. Perekrutan para caleg;
2. Penetapan para caleg;
3. Program visi dan misi dalam mempertahankan kursi di DPRD pada kemenangan pemilu.

Selain adanya LP2, PPP juga mempunyai organisasi yang bernama OKK yaitu organisasi keanggotaan dan kaderisasi. Tugasnya adalah menyusun struktur partai yaitu mulai dari PAC sampai ke ranting. Selain itu, OKK juga mempunyai program pendidikan yang dinamakan LKKD (latihan kepemimpinan kader pratama), di mana nama yang sebelumnya adalah PKD (pelatihan kader dasar) karena nama LKKD sendiri diganti oleh kepengurusan PPP yang baru dan latihan/pendidikan LKKD sendiri dilakukan di kabupaten kota. Sedangkan di

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Latief Musom anggota DPC Partai Persatuan Pembangunan kota Palembang (Wawancara Pada Tanggal 26 Februari 2018).

provinsi namanya adalah LKKM (latihan kepemimpinan kader madya) dan untuk di DPP namanya adalah LKKU (latihan kepemimpinan kader utama). Pemateri LKKD sendiri berasal dari DPW dan bisa juga dari DPP.⁶⁸

Dari segi pencalonan, PPP sendiri mempunyai 70% dari kader partai (internal) dan 30% dari kader luar (eksternal). Syarat dari kader luar (eksternal) sendiri lebih memprioritaskan tokoh masyarakat, tokoh agama dan para pengusaha yang ingin bergabung yang mempunyai kekuatan finansial (memiliki banyak uang) untuk memperoleh suara dengan caranya sendiri. Syarat menjadi kader adalah sudah berusia 17 tahun yang telah mempunyai hak pilih dan dipilih yang akan mendaftar ke DPC, kemudian DPC akan memproses untuk membuat KTA (kartu tanda anggota) melalui DPP yang dilakukan secara online dan KTA akan dicetak oleh DPW. Kemudian syarat lain untuk menjadi kader, pendidikan terakhir minimal harus lulus SMA.⁶⁹

Dilihat dari segi hubungan antara caleg dari luar dan dalam partai sendiri tidak adanya kecurangan yang dilakukan. Akan tetapi apabila ada caleg dari luar mempunyai dana yang lebih kuat, maka caleg itu lebih diprioritaskan untuk duduk di kursi nomor 1 dan caleg dari luar itu akan diutamakan untuk mendulang suara lebih banyak. Sedangkan caleg yang mempunyai minim biaya, caleg tersebut hanya untuk melengkapi perolehan suara dari caleg yang mempunyai dana yang lebih tadi. Karena apabila hanya mengandalkan popularitas saja, maka caleg

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Latief Musom anggota DPC Partai Persatuan Pembangunan kota Palembang (Wawancara Pada Tanggal 26 Februari 2018).

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Latief Musom anggota DPC Partai Persatuan Pembangunan kota Palembang (Wawancara Pada Tanggal 26 Februari 2018).

tersebut hanya sedikit untuk memperoleh jumlah suara, contohnya caleg tersebut berasal dari tokoh agama atau tokoh masyarakat hanya mengandalkan popularitasnya saja tanpa adanya dana yang lebih maka caleg itu sulit terpilih untuk menjadi anggota legislatif.⁷⁰

C. Dana Kampanye (Logistik) dan Pemenangan Caleg

Mengenai dana soal kampanye, dana di dapatkan dari DPP karena ada saksi yang berasal dari DPP dan ada juga sumbangan dana yang berasal dari kader. Karena dana tersebut juga untuk diberikan kepada saksi yang ada, sebab saksi juga berasal dari luar dan dalam partai. Dana kampanye yang disiapkan sesuai dengan jumlah kursi (caleg) dan beberapa saksi, contohnya pada dapil 3 mempunyai jumlah 6 kursi (yang berarti ada 6 caleg) dan dibagi dengan beberapa saksi, maka di dapil 3 tersebut mempunyai TPS sebanyak 1.326 dan caleglah yang akan menyiapkan dana untuk para saksi. Pada pemilu tahun 2014, caleg menyiapkan dana sebanyak 7 juta setiap caleg untuk dana operasional saksi.⁷¹

Dalam proses pemenangan pileg dari awal pendaftaran sampai pemenangan, PPP mempunyai LP2 yang bertugas sebagai penanggung jawab terhadap persiapan pemilu yang mana tugasnya juga merekrut caleg. PPP juga telah memanfaatkan mesin partainya yang bergerak sesuai tingkatan dari atas sampai ke tingkatan paling bawah. Di dalam perekrutan caleg, PPP juga mempunyai 30% kader dari luar (eksternal) yaitu para kadernya berasal dari simpatisan, tokoh

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Latief Musom anggota DPC Partai Persatuan Pembangunan kota Palembang (Wawancara Pada Tanggal 26 Februari 2018).

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Latief Musom anggota DPC Partai Persatuan Pembangunan kota Palembang (Wawancara Pada Tanggal 26 Februari 2018).

masyarakat, tokoh agama, orang-orang intelektual dan orang yang profesional, figur publik serta tokoh-tokoh muda yang memiliki basis suara (kemampuan menjadi bakal caleg).⁷²

Pada pemilu tahun 2014 di kota Palembang, target dari PPP adalah bisa mempertahankan jumlah suara (jumlah kursi) yang diperoleh. Dari segi jumlah suara, PPP memperoleh suara sebanyak 30% berbeda dengan perolehan suara yang di dapatkan pada pemilu sebelumnya (tahun 2009). Koordinasi antara pimpinan pusat dan pimpinan daerah PPP sendiri berjalan lancar sesuai dengan tingkatannya, yaitu dari DPP ke DPW, DPW ke DPC dan DPC ke PAC serta pimpinan ranting sampai ke tingkat paling bawah. Dan koordinasi untuk DPC PPP di kota Palembang, antara PAC dan rantingnya sudah dibekali dengan penetapan dan koordinasi pemenangan pemilu dalam rangka penghitungan suara melalui caleg-caleg itu sendiri dan melalui saksi-saksi di TPS.⁷³

D. Strategi Pemenangan

Strategi yang dilakukan oleh PPP untuk memenangkan/memperoleh suara yang ditargetkan⁷⁴, yaitu dengan cara:

1. Merekrut saksi-saksi yang ada di setiap TPS;
2. Merekrut saksi-saksi yang ada di setiap RT;
3. Melalui figur (para tokoh-tokoh yang ada di dalam partai);

⁷² Hasil Wawancara dengan Bapak Latief Musom anggota DPC Partai Persatuan Pembangunan kota Palembang (Wawancara Pada Tanggal 26 Februari 2018).

⁷³ Hasil Wawancara dengan Bapak Latief Musom anggota DPC Partai Persatuan Pembangunan kota Palembang (Wawancara Pada Tanggal 26 Februari 2018).

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Latief Musom anggota DPC Partai Persatuan Pembangunan kota Palembang (Wawancara Pada Tanggal 26 Februari 2018).

4. Melalui kultur (seni/budaya);
5. Melalui struktur partai.

Ada pula strategi yang dilakukan oleh PPP adalah dengan melalui akar rumput (PAC), kemudian PAC itu ada yang namanya ranting. Ranting di setiap kelurahan tersebut adanya anak ranting dan di setiap RT akan ada anak ranting yang bertugas untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang visi dan misi partai serta untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat supaya mendapatkan perolehan suara yang cukup banyak. Strategi berikutnya yaitu melalui isu, maksudnya adalah isu-isu apa saja yang berkembang di masyarakat, contohnya di suatu tempat (wilayah) tersebut meminta perbaikan jalan yang rusak dan masalah pendidikan yang masih dikenakan biaya, maka PPP akan membantu dengan cara melalui dana dari dewan yang duduk di kursi DPRD yaitu melalui dana aspirasi yang akan diberikan ke tempat (wilayah) yang membutuhkan. Kemudian ada juga strategi yang dilakukan dengan cara sosialisasi oleh para caleg yaitu dengan cara mengumpulkan ranting-ranting dan mengajak mengajak masa yang bertujuan untuk menjelaskan visi dan misi partai serta menjelaskan visi dan misi caleg itu sendiri.⁷⁵

Faktor-faktor yang mendukung strategi PPP dalam kinerja partai pada saat pemilu tahun 2014 di kota Palembang⁷⁶, yaitu:

1. Adanya figur dari para caleg;

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Latief Musom anggota DPC Partai Persatuan Pembangunan kota Palembang (Wawancara Pada Tanggal 26 Februari 2018).

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Latief Musom anggota DPC Partai Persatuan Pembangunan kota Palembang (Wawancara Pada Tanggal 26 Februari 2018).

2. Adanya figur pimpinan partai;
3. Adanya mobilisasi dana;
4. Adanya media cetak maupun elektronik.

Sedangkan faktor-faktor penghambatnya⁷⁷, yaitu:

1. Kecurangan yang ada di pemilu legislatif salah satunya adalah adanya PPS (panitia pemungutan suara) yang ada di TPS bermain dengan para caleg lain, contohnya adanya penambahan suara pada C1 di TPS tersebut hasilnya berbeda dengan C1 yang ada di TPS lain, kecurangan tersebut juga dinamakan penggelembungan suara.
2. Adanya suap (money politik) yang terjadi di dalam pemilu, karena di jaman sekarang yang mempunyai banyak uang lebih diprioritaskan. Berbeda pada jaman sebelum reformasi, di mana banyak orang yang berbondong-bondong untuk menjadi caleg tanpa disuruh.
3. Adanya faktor penghambat komunikasi selain komunikasi kepada pimpinan partai khususnya di kecamatan masih kurang. Contohnya ketua PAC di kecamatan mencalonkan diri sebagai caleg, padahal tujuan tersebut hanya untuk mencukupi kuota dan tiba-tiba ada caleg dari luar tersebut tidak menggunakan struktur partai yang ada di kecamatan dan membuat tim sukses sendiri akibat kurangnya komunikasi kepada pimpinan partai. Itulah salah satu yang menyebabkan terjadinya miskomunikasi antara caleg dari dalam dan dari luar partai.

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Latief Musom anggota DPC Partai Persatuan Pembangunan kota Palembang (Wawancara Pada Tanggal 26 Februari 2018).

E. Elektabilitas Partai

Dari PPP sendiri dalam pemilihan legislatif tahun 2014 tidak terlalu berdampak dalam elektabilitas terhadap partai, khususnya PPP di kota Palembang masih mempertahankan 2 kursi di DPRD kota Palembang dan ada kenaikan dari segi jumlah perolehan suara sebanyak 30% dari pemilihan legislatif di tahun sebelumnya (2009).⁷⁸

Sementara itu hal yang terkait dalam menopang elektabilitas dari PPP sendiri yaitu salah satunya dengan cara menempatkan figur pada setiap dapil yang mampu menaikkan elektabilitas dan mengikuti perkembangan zaman terutama di media sosial yang memberitakan tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PPP.⁷⁹

TABEL. 8

Jumlah Perolehan Suara Caleg PPP pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Palembang Dapil 1 (Kec. Sukarami, Kemuning & Alang-Alang Lebar)

No	Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Sukarami	Kemuning	Alang-Alang Lebar	Jumlah Akhir
	Nomor>Nama Partai dan Calon				
	Partai Persatuan Pembangunan	501	412	285	1.198

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Latief Musom anggota DPC Partai Persatuan Pembangunan kota Palembang (Wawancara Pada Tanggal 26 Februari 2018).

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Latief Musom anggota DPC Partai Persatuan Pembangunan kota Palembang (Wawancara Pada Tanggal 26 Februari 2018).

1	DRS. Azhari Mawardi. MM	658	961	400	2.019
2	DRS. Isa Ansori Yusuf. MM	54	32	36	122
3	Mei Yulyah Ningsih. SH	33	18	19	70
4	Usman Kusim. S.Ag	122	80	301	503
5	Ahmad Zaky Wahid Amrullah. ST	91	44	46	181
6	Ivana. SP., M.SI	25	24	35	84
7	IR. Alkat Samsul Bahri	27	27	128	182
8	Desy Aryani. SE	25	151	27	203
9	Yuli Andrika Dinata	180	32	63	275
10	Sutrisman MZ., SE	102	227	68	397
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	1.818	2.008	1.408	5.234

Sumber: KPU kota Palembang

Dapil 2 (Kec. Sako, Kalidoni & Sematang Borang)

No	Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Sako	Kalidoni	Sematang Borang	Jumlah Akhir
	Nomor>Nama Partai dan Calon				
	Partai Persatuan Pembangunan	249	583	176	1.008
1	Dwikora Sastranegara. SH	369	2.066	274	2.709
2	Yulianti. SH.I	29	79	21	129
3	Nurmala. SH	36	204	25	265

4	MGS. M. Ali Febriansyah. S.IP	87	101	35	223
5	Arie Juanda. SH	67	41	18	126
6	Siska Melisa	20	30	36	86
7	H. Umar Malik. S.Pd	59	85	26	170
8	H. Johan Syafri. S.Sos	244	372	1.011	1.627
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	1.160	3.561	1.622	6.343

Sumber: KPU kota Palembang

Dapil 3 (Kec. Seberang Ulu II & Plaju)

No	Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Seberang Ulu II	Plaju	Jumlah Akhir
	Nomor>Nama Partai dan Calon			
	Partai Persatuan Pembangunan	747	226	973
1	Ahmad Saleh. MS	257	355	612
2	Latif Musom	245	147	392
3	Angela Agustian. S.Pd	35	56	91
4	Baki Yudin	42	57	99
5	Fatimah	76	34	110
6	Ir. H. Abdul Rozak. M.Sc	4.288	1.108	5.396
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	5.690	1.983	7.673

Sumber: KPU kota Palembang

Dapil 4 (Kec. Seberang Ulu I & Kertapati)

No	Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Seberang Ulu I	Kertapati	Jumlah Akhir
	Nomor>Nama Partai dan Calon			
	Partai Persatuan Pembangunan	686	267	953
1	H. Taufik Hidayat	1.328	455	1.783
2	Desmana Akbar	3.282	633	3.915
3	Ropiko. S.Sos.I	2.627	583	3.210
4	Muhammad Yani Bahtera. SH	78	355	433
5	Masayu Nola Indri Sari. A.Md	43	18	61
6	Kemas HS. Effendi. SE	466	19	485
7	Rustini	485	42	527
8	Neny Junilyah. SE	56	10	66
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	9.051	2.382	11.433

Sumber: KPU kota Palembang

Dapil 5 (Kec. Ilir Barat II, Ilir Barat I, Bukit Kecil & Gandus)

No	Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Ilir Barat II	Ilir Barat I	Bukit Kecil	Gandus	Jumlah Akhir
	Nomor>Nama Partai dan Calon					
	Partai Persatuan Pembangunan	138	467	159	220	984
1	Rusman Effendi. S.IP	94	205	96	575	970
2	Hasnul Amin	22	68	22	115	227

3	Yulilia. ST	212	1.047	152	196	1.607
4	Edwin Setia Budi	100	66	48	34	248
5	Hj. Elis Atika Izzy. S.Sos	345	349	94	317	1.105
6	Herman	13	130	23	23	189
7	DRS. Zamzani Cossasi	27	40	68	14	149
8	Rasakinah. SE	48	24	16	7	95
9	MGS. A. Rahman. SH.I	87	180	378	122	767
10	A. Khadafi	24	36	6	8	74
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	1.110	2.612	1.062	1.631	6.415

Sumber: KPU kota Palembang

Dapil 6 (Kec. Ilir Timur I & Ilir Timur II)

No	Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Ilir Timur I	Ilir Timur II	Jumlah Akhir
	Nomor>Nama Partai dan Calon			
	Partai Persatuan Pembangunan	333	1.105	1.438
1	H. Syahril Eddy. SH	769	3.463	4.232
2	Nurul Chotimah. S.Ag	236	618	854
3	DRS. Amir Hamzah	190	612	802
4	Alfaruk Mazyaridi. SE	13	76	89
5	Asiah	17	61	78
6	Ir. H. Tahtawahasyim	17	34	51

7	Erick Capera Ali. SH	4	6	10
8	Rinzahaya	130	14	144
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	1.709	5.989	7.698

Sumber: KPU kota Palembang

2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

A. Struktur Kepengurusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

TABEL. 9

Struktur dan Komposisi Kepengurusan Badan Pemenangan Pemilu (BP-Pemilu) Daerah Sumatera Selatan PDIP Periode 2015-2020

No	Nama	Jabatan
1	ROBBY B. PURUHITA, SE	Ketua
2	- ACHMAD SAZALI, S.Pd., M.Si - Drs. H. M. SYARIF HIDAYAT, MM	Wakil Ketua
3	USMAN EFFENDI, SH., M.Hum	SEKRETARIS
4	BUSTANUL FAHMI, S.Kom	WAKIL SEKRETARIS
5	H. ASNAWI, HD	BENDAHARA
6	FEBY VALENTIN, S.Kom	WAKIL BENDAHARA
7	BAMBANG YUSNANTARA, S.Ip	KOORDINATOR BIDANG INTERNAL
8	MUHAMMAD ERWINSYAH	BIDANG INTERNAL 1

		<i>(RISET/ SURVEY/ DATA/ ANALISA)</i>
9	YUDHISTIRA, SE	BIDANG INTERNAL 2 <i>(SUMBER DAYA LOGISTIK)</i>
10	YOYON, SP	KOORDINATOR BIDANG EKSTERNAL
11	IKBAL	BIDANG EKSTERNAL 1 <i>(KAMPANYE DAN MEDIA)</i>
12	FIRLY DARTA, SH	BIDANG EKSTERNAL 2 <i>(PENGALANGAN AKSI & PENGERAHAN MASSA)</i>
13	ANDREAS OP, SE.Ak	KOORDINATOR BIDANG TERITORIAL
14	KURNIAWAN HIDAYAT, SH	BIDANG TERITORIAL 1 <i>(PERENCANAAN DAN STRATEGI)</i>
15	ZAMZAM MABRUR NURIS, SH	BIDANG TERITORIAL 2 <i>(PENGALANGAN SEKTOR DAN RELAWAN)</i>
16	IBRAHIM ADHA, SH	BIDANG TERITORIAL 3 <i>(PENGALANGAN K/L, TIGA PILAR, KPU/KPUD DAN BAWASLU/PANWASLU)</i>

Sumber: DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kota Palembang

TABEL. 10

**Daftar Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Fraksi Dewan Pimpinan Daerah
(DPD) PDIP Daerah Sumatera Selatan Periode 2010-2015**

No	Nama	Jabatan
1	Ir. H. Eddy Santana Putra, MT	Ketua
2	H. Fahlevi Maizano, SH., MH	Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai
3	H. M. Giri Ramanda N. Kiemas, SE., MM	Wakil Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar lembaga
4	H. Darmadi Djufri, SH., MH	Wakil Ketua Bidang Organisasi
5	H. M. Ilyas Panji Alam, SH., SE., MM	Wakil Ketua Bidang Keanggotaan, Kaderisasi dan Rekrutmen
6	Ir. Yudha Rinaldi	Wakil Ketua Bidang Informasi dan komunikasi
7	Herlan, SE., M.Si., MBM	Wakil Ketua Bidang Sumber daya dan Dana
8	Dr. Ir. Hj. Elmeizy Arafah, MS	Wakil Ketua Bidang Pertanian

9	Ir. H. Aswandi Asgap Serampoe	Wakil Ketua Bidang Perikanan dan Kelautan
10	Susanto Adjis, SH	Wakil Ketua Bidang Kesehatan dan Tenaga Kerja
11	H. Said Albar, SH., MM	Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan
12	Endang Wasiati, SE	Wakil Ketua Bidang Industri dan Perdagangan, Pengusaha Kecil- Menengah dan Koperasi
13	Robby B. Puruhita, SE	Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga
14	Hj. Sumiati, SH., MM	Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak
15	H. A. Syarnubi, SP., MM	Wakil Ketua Bidang Pemerintah dan Otonomi Daerah
16	H. Saichoe Goenawan Moeslimin, SH	Wakil Ketua Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan

17	M. A. Gantada, SH., M.Hum	Sekretaris
18	Usman Effendi, SH., M.Hum	Wakil Sekretaris Bidang Internal
19	Riza Toni Siahaan, STP	Wakil Sekretaris Bidang Program
20	H. Ishak Yulian Yusuf, SE., MBA	Bendahara
21	Drs. Barata Rahadi Wibowo	Wakil Bendahara

Sumber: DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kota Palembang

B. Rekrutmen Caleg

Mekanisme perekrutan caleg yang dilakukan oleh PDIP dengan cara membentuk tim penyaringan caleg, yaitu dibuka pendaftaran pencalegkan bagi seluruh kader PDIP khususnya kader yang bisa mengikuti pencalegkan ini adalah kader yang sudah mengikuti pendidikan kader. Jadi di dalam PDIP itu sendiri, pendidikan kader ini memiliki 3 tahap⁸⁰, yaitu:

1. Pendidikan Kader Pratama adalah pendidikan untuk caleg tingkat kabupaten kota.
2. Pendidikan Kader Madya adalah pendidikan untuk caleg tingkat provinsi.
3. Pendidikan Kader Utama adalah pendidikan untuk caleg tingkat RI.

PDIP memprioritaskan caleg dari anggotanya sendiri, yaitu dengan dilakukannya pendidikan kader pratama. Apabila ada calon dari luar partai, maka calon tersebut harus atau wajib mengikuti prosedur yang telah dibuat oleh PDIP.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Firlir Darta. SH anggota DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kota Palembang (Wawancara Pada Tanggal 31 Maret 2018).

Apabila calon tersebut tidak mengikuti pendidikan kader, maka calon tersebut tidak bisa mengikuti pencalegkan, karena itu adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh PDIP. Pendidikan kader yang telah dibuat oleh PDIP sendiri sudah terlaksana di 17 kabupaten kota, salah satunya adalah kabupaten Prabumulih.⁸¹

Dari segi perekrutan anggota, PDIP sendiri sudah pasti merekrut dari tokoh agama, masyarakat dan adat. Selain itu PDIP juga memiliki beberapa sayap (organisasi)⁸², yaitu:

1. Bamusi (Baitul Muslimin), anggotanya terdapat kyai-kyai yang berasal dari NU dan Muhammadiyah.
2. Repdem (Relawan Demokrasi Perjuangan), anggotanya berasal dari para aktivis.
3. BMI (Banteng Muda Indonesia), anggotanya berasal dari anak muda dan tokoh-tokoh muda.
4. TMP (Taruna Merah Putih), anggotanya adalah orang-orang yang mempunyai bakat seni.
5. GANTI (Gerakan Tani dan Nelayan), anggotanya adalah para petani dan nelayan.

Di Sumsel sendiri 3 sayap (organisasi) yang baru terbentuk, yaitu Bamusi, Repdem dan BMI. Karena yang 2 organisasi lagi baru akan ditambahkan/dibentuk

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Firli Darta. SH anggota DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kota Palembang (Wawancara Pada Tanggal 31 Maret 2018).

⁸² Hasil Wawancara dengan Bapak Firli Darta. SH anggota DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kota Palembang (Wawancara Pada Tanggal 31 Maret 2018).

dari pusat. Dan organisasi-organisasi tersebut digunakan untuk pemenangan caleg, karena organisasi tersebut sudah dibuat sampai tingkat PAC.

PDIP secara strukturalisasi yaitu partai yang menggunakan demokrasi terpimpin. Jadi koordinasi antara pimpinan pusat dan daerah dilakukan secara kolektif, vertikal dan tingkatannya dari DPC ke DPD, DPD ke DPP. Sebab itu adalah garis koordinasi, jadi DPC tidak bisa langsung koordinasi ke DPP karena sudah ada garis koordinasi yang telah ditetapkan. Koordinasi antara pimpinan pusat dan daerah pasti dilaksanakan setelah PDIP membentuk tim penyaringan, nama-nama yang masuk dalam penyaringan maka akan diusulkan ke DPP dan DPP mengeluarkan surat keputusan (SK) pencalegkan tersebut. Jadi sifat dari DPD ini hanya menyaring calon-calon, sebaliknya dari DPC juga melakukan penyaringan sama seperti yang dilakukan oleh DPD.⁸³

Setelah DPC dan DPD melakukan penyaringan terhadap calon-calon yang telah dipilih, maka hasilnya akan diserahkan ke DPP pusat dan DPP pusat yang akan menentukan dengan menggunakan mekanisme yang sudah ada. Jadi aturannya setiap caleg harus mengikuti pendidikan terlepas dari syarat-syarat yang diatur oleh Undang-Undang. Pendidikan Kader Pratama adalah pendidikan yang memang dilakukan oleh PDIP yang sudah melalui tahapan badan diklat. Jadi di PDIP ada badan khusus yang mengurus/menangani masalah pendidikan, yaitu badiklat (badan pendidikan kaderisasi). Jadi para anggota PDIP (kader) di setiap daerah, harus melaksanakan pendidikan kader dan kegiatan tersebut dilakukan sebelum adanya pileg dan bukan dilakukan saat menjelang pileg, kegiatan ini pun

⁸³ Hasil Wawancara dengan Bapak Firlil Darta. SH anggota DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kota Palembang (Wawancara Pada Tanggal 31 Maret 2018).

dilaksanakan setiap tahunnya. Dan kegiatan ini juga sudah terlaksana dari tahun-tahun sebelumnya dan memang pada saat itu kader PDIP yang berminat untuk mengikuti pencalegkan, salah satu syaratnya harus mengikuti pendidikan yang diawasi oleh badiklat. Pendidikan tersebut dilaksanakan selama 1 minggu sesuai dengan xylabus (petunjuk) dimana pematerinya berasal dari DPP dan ada juga yang dari DPD dan PDIP sendiri sudah melaksanakan pendidikan kader pratama kurang lebih sebanyak 1.500 anggota yang telah mengikuti pendidikan tersebut.⁸⁴

Pada tahap selajutnya, apabila caleg tersebut dinyatakan lolos dari sekian banyak peserta yang mengikuti pendidikan kader pratama yang progamnya tersebut dilakukan oleh PDIP, maka caleg tersebut akan masuk dalam daftar caleg sementara (DCS) dimana nama-nama para caleg akan dikirim ke KPU. Selanjutnya apabila tidak ada perubahan yang dilakukan PDIP maka nama-nama para caleg tersebut akan menjadi daftar caleg tetap (DCT) dan apabila sudah menjadi daftar caleg tetap (DCT) maka tidak bisa dirubah (diganggu gugat) kecuali calon tersebut meninggal dunia atau pindah ke partai lain. Setiap DPC yang ada di kabupaten kota harus memenuhi 30% kader perempuan dari partai itu sendiri dan kader perempuan dinyatakan menjadi kader mereka harus mengikuti pendidikan kader, tetapi tidak seluruhnya menjadi kader, misalnya mereka yang mengikuti pencalegkan ada 100 anggota maka hanya 5 anggota yang akan dipilih untuk mengikuti tingkat madya.⁸⁵

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Firlidarta, SH anggota DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kota Palembang (Wawancara Pada Tanggal 31 Maret 2018).

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Firlidarta, SH anggota DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kota Palembang (Wawancara Pada Tanggal 31 Maret 2018).

Strategi yang dilakukan oleh PDIP dalam melakukan penyaringan caleg, para kader yang diberikan mandat untuk mencaleg tersebut sudah mempunyai basis, yang dimaksud adalah kader tersebut sudah bekerja sebelumnya dalam artian bekerja membangun kolektifitas anak ranting, membangun kolektifitas kerja-kerja partai dan melakukan sosialisasi yang sudah dilaksanakan, jadi inilah strategi yang dilakukan. Strategi PDIP tersebut memiliki mesin partai yang sudah ada sampai di kelurahan dan itulah mesin partai yang dilakukan oleh PDIP, karena kolektifitas PDIP sekarang seperti saksi PDIP mempunyai badan saksi nasional, jadi saksi tersebut ditanggung oleh partai, maka setiap caleg akan memiliki saksi dari partai.⁸⁶

C. Dana Kampanye (Logistik) dan Pemenangan Caleg

Mengenai soal dana kampanye, caleg PDIP dari dulu menggunakan cara gotong-royong. Jadi memang seluruh caleg PDIP gotong-royong untuk mengumpulkan dana kampanye. Karena sistem dari KPU yang sekarang, bahan-bahan untuk persiapan kampanye sekarang sudah dibatasi oleh KPU, jadi itu menjadi kerja dari anggota-anggota partai. Sebab peserta pemilu tersebut bukan perorangan (bukan dana dari caleg yang menjadi calon) tetapi dana juga berasal dari partai, jadi dana tersebut gotong-royong dari kader (caleg), contohnya per dapil tersebut ada 10 orang yang mencalon, maka 10 orang (caleg) tersebut gotong-royong mengumpulkan dana dengan nominal yang sama.⁸⁷

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Firli Darta. SH anggota DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kota Palembang (Wawancara Pada Tanggal 31 Maret 2018).

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Firli Darta. SH anggota DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kota Palembang (Wawancara Pada Tanggal 31 Maret 2018).

Dari segi struktur kepengurusan, PDIP pada tahun 2014 sama seperti di tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi ada penambahan badan yang ditambah salah satunya seperti BSPN (Badan Saksi Panitia Nasional). Proses pemenangan pileg yang dilakukan oleh PDIP sendiri yaitu dengan cara melakukan strategi pemenangan pemilu melalui badan pemenangan pemilu. Di DPD Sumsel sudah melakukan beberapa hal seperti pendidikan, Badan Saksi Panitia Nasional (BSPN) serta melakukan pendidikan secara masal (masif) tersebut telah dilakukan. Dan dalam proses penyaringan calon memang hal tersebut ada, yaitu dengan dilakukannya penyeleksian supaya pencalegkan kader-kader tersebut harus memiliki basis masa tersendiri. Dalam proses pemenangan pileg dari awal pendaftaran sampai pemenangan, mesin partai dari PDIP sendiri sudah berjalan khususnya di partai, mungkin pada PDIP sendiri yang hanya memiliki mesin partai sampai tingkat ranting (kelurahan).⁸⁸

Pada pemilu tahun 2014 di kota Palembang, target perolehan kursi PDIP telah dicapai dengan memperoleh 9 kursi dari 7 kursi dalam pemilu sebelumnya (tahun 2009). Apabila melihat sistem penghitungan yang baru, pada tahun 2014 kemarin jika penghitungannya di aplikasikan dengan sistem penghitungan pembagi bilangan, bisa saja PDIP mendapatkan 12 kursi sesuai dengan sistem DPP. Karena sistem penghitungan yang sekarang dilakukan dengan cara bilangan

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Firlidarta, SH anggota DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kota Palembang (Wawancara Pada Tanggal 31 Maret 2018).

khususnya bilangan pembagi ganjil. Dan di pemilu selanjutnya, PDIP memiliki target sebanyak 12 kursi.⁸⁹

Pada sistem penghitungan pemilu yang sekarang dibuat supaya komunikasi antar caleg bisa kompak, berbeda dengan sistem sistem penghitungan pemilu sebelumnya, sistem dari DPP ketika suara yang sudah dihitung tidak cukup di DPP maka suara yang sudah dikumpulkan tersebut akan hilang. Dan sistem suara penghitungan yang sekarang, perolehan suara dikumpulkan terlebih dahulu dan dibagi dengan sistem pembilang, jadi suara yang sudah terkumpul tersebut tidak akan hilang begitu saja.

D. Strategi Pemenangan

Strategi yang dilakukan oleh PDIP pada masa menjelang pemilu legislatif di kota Palembang yaitu

1. Para kader partai melakukan pendekatan-pendekatan persuasif dengan masyarakat melalui tatap muka (berbicara secara langsung);
2. Memberikan sosialisasi mengenai arti dari sebuah partai dalam pemilihan;
3. Menyampaikan tujuan dari partai untuk ikut serta dalam pemilihan umum.

Salah satu faktor yang mendukung strategi PDIP dalam kinerja partai pada saat pemilu tahun 2014 lalu di kota Palembang adalah mesin partai yang merupakan aset pendukung dalam pemenangan pilkada/pileg. Sedangkan dari faktor penghambat salah satunya adalah dari sistem komunikasi, jadi dalam pencalegkan akan adanya pembekalan terhadap caleg-caleg dalam melaksanakan

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Firlu Darta. SH anggota DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kota Palembang (Wawancara Pada Tanggal 31 Maret 2018).

kegiatan-kegiatan untuk sosialisasi (kampanye), sebab hal tersebut untuk mengurangi miskomunikasi antar caleg. Karena caleg-caleg yang sebelumnya, yang menyebabkan adanya perdebatan tersebut adalah dari anggota di dalam partai itu sendiri bukan hanya dari faktor yang ada di luar partai. Oleh karena itu saksi sendiri diambil dari dalam partai untuk mengurangi kecurigaan antar sesama caleg dan hal tersebut dilakukan secara adil.⁹⁰

E. Elektabilitas Partai

Dari PDIP sendiri dalam pemilihan legislatif tahun 2014 tidak terlalu berdampak dalam elektabilitas terhadap partai, khususnya PDIP di kota Palembang karena mendapatkan perolehan suara terbanyak di kota Palembang dan perolehan tersebut berbeda dengan pemilihan legislatif di tahun 2009 serta perolehan suara di tahun 2014 tersebut mencapai target yang diharapkan oleh partai.⁹¹

Sementara itu hal yang terkait dalam menopang elektabilitas dari PDIP sendiri dengan memanfaatkan kerja-kerja mesin partai dari tingkat ranting sampai pimpinan atas, mungkin dari PDIP sendiri yang pengurusan partainya sampai anak ranting. Selain itu, ada indikator-indikator yang lain salah satu contohnya adalah pengawalan kebijakan pemerintahan Jokowi dimana hal tersebut dapat menopang elektabilitas dari PDIP.⁹²

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Firli Darta. SH anggota DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kota Palembang (Wawancara Pada Tanggal 31 Maret 2018).

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Firli Darta. SH anggota DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kota Palembang (Wawancara Pada Tanggal 31 Maret 2018).

⁹² Hasil Wawancara dengan Bapak Firli Darta. SH anggota DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kota Palembang (Wawancara Pada Tanggal 31 Maret 2018).

TABEL. 11**Jumlah Perolehan Suara Caleg PDIP pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di****Kota Palembang****Dapil 1 (Kec. Sukarami, Kemuning & Alang-Alang Lebar)**

No	Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Sukarami	Kemuning	Alang-Alang Lebar	Jumlah Akhir
	Nomor>Nama Partai dan Calon				
	PDIP Perjuangan	4.007	3.107	2.300	9.414
1	H. Darmawan. SH	1.385	3.001	885	5.271
2	Julius Alev Yadhie	635	304	286	1.225
3	Novia Pahlawan., SE	468	227	162	857
4	H. M. Ali Sya'ban	1.048	1.415	325	2.788
5	Ahmad Saihu. SE	198	195	603	996
6	Murniati Puspita Ningrum	533	151	355	1.039
7	Hendra Wijaya. ST	1.594	561	232	2.387
8	Setyo Budi Irawan	1.208	376	190	1.774
9	Amir. A.Md	219	228	450	897
10	Nurlinda. SE	124	199	87	410
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	11.419	9.764	5.875	27.058

Sumber: KPU kota Palembang

Dapil 2 (Kec. Sako, Kalidoni & Sematang Borang)

No	Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Sako	Kalidoni	Sematang Borang	Jumlah Akhir
	Nomor>Nama Partai dan Calon				
	PDI Perjuangan	2.528	2.609	959	6.096
1	Hagmar Bandamana. SH	603	1.160	339	2.102
2	M. Aidil Adhari. ST	1.868	1.243	2.690	5.801
3	Yulianan Puspa Dewi. SE.Ak	434	365	89	888
4	Duta Wijaya Sakti	631	479	2.320	3.430
5	Badriyah Ilham	74	1.580	36	1.690
6	Siswanto Adrs	233	192	42	467
7	Yeny Anis	170	144	42	356
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	6.541	7.772	6.517	20.830

Sumber: KPU kota Palembang

Dapil 3 (Kec. Seberang Ulu II & Plaju)

No	Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Seberang Ulu II	Plaju	Jumlah Akhir
	Nomor>Nama Partai dan Calon			
	PDI Perjuangan	1.309	1.209	2.518

1	Zulkipli	936	270	1.206
2	Ellyza. S.Pd	225	182	407
3	H. Edy Saad. SH., MM	1.005	415	1.420
4	Hamzah Zainuddin	147	183	330
5	H. Bahruzzaman Harun. SE	553	734	1.287
6	Rian Dani Ulfa. ST	202	877	1.079
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	4.377	3.870	8.247

Sumber: KPU kota Palembang

Dapil 4 (Kec. Seberang Ulu I & Kertapati)

No	Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Seberang Ulu I	Kertapati	Jumlah Akhir
	Nomor>Nama Partai dan Calon			
	PDI Perjuangan	2.789	1.288	4.077
1	Fery Sanjaya. S.Pd	638	1.993	2.631
2	M. Firmansyah Hasan. SE., MM	3.794	151	3.945
3	Sri Wulandari Lubis. A.Md	287	76	363
4	Syalfitri. SE., CH	316	176	492
5	Syamsul. SH	1.515	1.425	2.940
6	H. Ibrahim Laconi. SE., MM	314	54	368
7	A. Zaini Rivai. S.IP	378	602	980
8	Nyimas Ledy Dayanti	267	35	302

	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	10.298	5.800	16.098
--	---	--------	-------	--------

Sumber: KPU kota Palembang

Dapil 5 (Kec. Ilir Barat II, Ilir Barat I, Bukit Kecil & Gandus)

No	Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Ilir Barat II	Ilir Barat I	Bukit Kecil	Gandus	Jumlah Akhir
	Nomor>Nama Partai dan Calon					
	PDI Perjuangan	1.549	4.083	1.104	705	7.441
1	Ahmad Darwin	505	714	300	313	1.832
2	Ir. Misobah H.M. Sahil	362	2.053	1.770	318	4.503
3	Ayu Nur Suri. SE., MM	174	328	102	74	678
4	Abu Hasan Asaari	150	294	99	555	1.098
5	R.M. Yusuf Indra Kesuma	2.000	711	279	223	3.213
6	Fitrianti Agustinda. SH	1.149	2.101	545	1.075	4.870
7	M. Surya Maulidin	76	791	130	95	1.092
8	Arbain Semendawai. B.Sc., SH	844	481	343	336	2.004
9	Sumarni. SE	69	684	44	38	835
10	Yoyok Seprianto Prawijaya. A.Md	43	124	26	25	218
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	6.921	12.364	4.742	3.757	27.784

Sumber: KPU kota Palembang

Dapil 6 (Iir Timur I & Iir Timur II)

No	Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Iir Timur I	Iir Timur II	Jumlah Akhir
	Nomor>Nama Partai dan Calon			
	PDI Perjuangan	4.919	4.997	9.316
1	Ir. Alex Andonis	995	1.668	2.663
2	Yandris Suandi. SE	584	686	1.270
3	Ir. Neni Indriani	1.031	1.341	2.372
4	Maliki SAB	353	674	1.027
5	Ahmad Setiapada Gunayri. SE., M.SI	421	656	1.077
6	Budi Rosmala Dewi	268	158	426
7	Rizky Pratama Saputra. ST	245	254	499
8	Yustini Chairani. SH	323	610	933
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	9.139	11.044	20.183

Sumber: KPU kota Palembang

BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

Menghadapi Pemilu tahun 2014, berbagai strategi dilakukan oleh partai politik demi mendapatkan dukungan simpati massa. Pada Pemilu tahun 2014 di kota Palembang, adanya perbedaan strategi yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mempunyai strategi untuk memenangkan atau memperoleh suara yang ditargetkan, yaitu dengan cara:

6. Merekrut saksi-saksi yang ada di setiap TPS;
7. Merekrut saksi-saksi yang ada di setiap RT;
8. Melalui figur (para tokoh-tokoh yang ada di dalam partai);
9. Melalui kultur (seni/budaya);
10. Melalui struktur partai;
11. Melalui akar rumput (PAC) dan isu.

Sedangkan strategi yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yaitu:

4. Para kader partai melakukan pendekatan-pendekatan persuasif dengan masyarakat melalui tatap muka (berbicara secara langsung);
5. Memberikan sosialisasi mengenai arti dari sebuah partai dalam pemilihan;
6. Menyampaikan tujuan dari partai untuk ikut serta dalam pemilihan umum;

7. Memanfaatkan mesin partai yang merupakan aset pendukung dalam pemenangan pilkada/pileg.

Sementara itu, dampak dari pileg tahun 2014 di kota Palembang PPP dan PDIP sendiri tidak berdampak pada elektabilitas dari kedua partai tersebut. Pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh hasil yang dicapai yaitu dengan bisa mempertahankan jumlah suara (jumlah kursi) yang diperoleh yaitu PPP masih mempertahankan 2 kursi yang ada di DPRD kota Palembang dan ada kenaikan dari segi jumlah suara sebanyak 30% berbeda dengan perolehan suara yang di dapatkan pada pemilu sebelumnya (tahun 2009). Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh hasil yang dicapai yaitu dengan mendapatkan jumlah kursi sebanyak 9 kursi dari 7 kursi dalam pemilu sebelumnya (tahun 2009) serta perolehan suara di tahun 2014 tersebut mencapai target yang diharapkan oleh partai.

B. Saran

Menjelang pemilu tahun 2014, adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi selama pesta demokrasi berlangsung, salah satu kecurangan yang sering terjadi adalah money politic yang dilakukan oleh kader dari luar maupun dari dalam partai. Oleh karena itu, adanya saran kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk lebih tegas dalam mengatasi masalah seperti money politic yang terjadi pada pesta demokrasi, dengan cara membentuk kelompok (badan) yang mengawasi saat pesta demokrasi

sedang berlangsung, supaya tidak adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan seperti terjadinya money politic tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

- Adriana Elisabeth Sukamto, dkk, *PDI dan prospek pembangunan politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 1991.
- Budiarjo, Miriam (ed), *Partisipasi dan Partai Politik* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Efriza, *Political Explore; Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfa Beta, 2012.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana PRENADAMEDIA Group, 2013.
- Fadillah Putra, *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Hamid, dkk. *Partai Politik lokal di Aceh, desentralisasi politik dalam negara kebangsaan*. Jakarta: Kemitraan, 2008.
- Larry Diamond. Op.Cit. 2003.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Miriam Budiardjo. Op.Cit.
- Pamungkas dan Sigit, *Perihal pemilu*. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, Yogyakarta, 2009.
- Peter Schroder, *Strategi Politik edisi revisi Pemilu 2009*. Jakarta: Friedrich-Nauman-Stiftung fur die Freiheit, Indonesia, 2008.
- Pipit R Kartawidjaja/Aminuddin dan M Faishal, *Demokrasi elektoral bagian 1 perbandingan Sistem dan Metode Kepartaian dan Pemilu*. Surabaya: Sindikasi Indonesia, 2014.
- Prof. Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* edisi revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Rabi'ah, *Lebih Dekat Dengan Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 1992.

Sigit Pamungkas, *Partai Politik Teori dan Praktek di Indonesia*. Yogyakarta: Institute For Democracy and Welfarism, 2011.

Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Syamsuddin Haris, *PPP dan Politik Orde Baru*. Jakarta: PT. Grasindo, 1991.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora*. Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora IAIN Raden Fatah, 2013.

Usman Husaini dan Akbar Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Sumber Internet

Basedau, dkk, Measuring Party Institutionalization In Developing Countries: A New Research Instrument Applied to 28 African Political Parties, Paper, 2008 dalam www.giga-hamburg.de/workingpapers.

Daalder, dkk: Denied, Dismissed or Redundant? A Critique, dalam *Political Parties: Old Concepts and New Challenges*, Richard Gunther, Jose Ramon-Montero dan Juan J. Linz (ed), Oxford University Press, 2002.

<https://dewapurnama.files.wordpress.com/pdf>. Diakses pada tanggal 19 Maret 2017.

http://elektabilitas.blogspot.co.id/2013/06/visi-misi-partai-demokrasi-indonesia_23.html?m=1. Diakses pada tanggal 28 November 2017.

<http://dpc-ppp-plg.blogspot.co.id/2012/10/khittah-dan-program-perjuangan-ppp.html?m=1>. Diakses pada tanggal 9 November 2017.

<http://m.antarsumsel.com/berita/261245/pp-palembang-mulai-data-calon-legislatif-2014>. Diakses pada tanggal 19 Maret 2017.

<https://m.merdeka.com/politik/pdip-target-dapat-pimpin-dprd-se-sumsel.html>. Diakses pada tanggal 19 Maret 2017.

https://www.academia.edu/19782358/SKRIPSI_ENDA.pdf. Diakses pada tanggal 9 November 2017.

www.mpk.muhammadiyah.or.id. Diakses pada tanggal 27 Agustus 2018.

Lampiran Dokumentasi Foto-Foto Penelitian



Gambar 1: Wawancara dengan anggota DPC Partai Persatuan Pembangunan kota Palembang Bapak Latief Musom (26 Februari 2018)



Gambar 2: Wawancara dengan anggota DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kota Palembang Bapak Firli Darta. SH (31 Maret 2018)



Gambar 3: Wawancara dengan Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas KPU kota Palembang Bapak Chemi (8 Maret 2018)

Daftar Narasumber

1. Nama : Latief Musom
Tempat tanggal lahir : Palembang, 16 April 1981
Umur : 37 Tahun
Pendidikan : SMK (sedang melanjutkan ke perguruan tinggi)
Jabatan : Wakil ketua bidang OKK DPC Partai Persatuan
Pembangunan kota Palembang

2. Nama : Firli Darta. SH
Tempat tanggal lahir : Pagaram, 14 Juni 1981
Umur : 37 Tahun
Pendidikan : S1
Jabatan : Badan pemenangan pemilu PDIP Sumatera Selatan

3. Nama : Chemi Martin Punggar
Tempat tanggal lahir : Palembang, 18 Mei 1988
Umur : 30 Tahun
Pendidikan : S2

Jabatan : Kasubbag teknis pemilu dan hupmas KPU kota
Palembang

**Daftar Wawancara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)**

1. Bagaimana mekanisme perekrutan calon anggota legislatif Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada pemilu tahun 2014 di kota Palembang?
2.
 - a. Apakah calon untuk anggota legislatif dari anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu sendiri?
 - b. Dari manakah dana kampanye yang didapatkan oleh calon anggota legislatif Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)?
3. Bagaimana proses pemenangan pileg dari awal pendaftaran sampai pemenangan:
 - a. Memanfaatkan mesin partai,
 - b. Merekrut tokoh agama, masyarakat dan adat.
4. Apakah target yang dicapai oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada pemilu tahun 2014 di kota Palembang?
5. Bagaimana koordinasi antara pimpinan pusat dan pimpinan daerah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kota Palembang dalam rangka pileg tahun 2014?

6. Bagaimana koordinasi antara pimpinan daerah (kota Palembang) dan struktur kepemimpinan dibawahnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada pemilu tahun 2014 di kota Palembang?
7. Bagaimana strategi yang dilakukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada pemilu tahun 2014 di kota Palembang?
8. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat strategi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam kinerja partai pada pemilu tahun 2014 di kota Palembang?

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Airlangga Wicaksana

NIM : 1544300001

JURUSAN : POLITIK ISLAM

JUDUL SKRIPSI : Strategi Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di kota Palembang.

Dosen Pembimbing I : Dr. Yazwardi. M.Ag.

No	Hari/Tanggal	Saran	Keterangan	Paraf
1-	8 Maret 2017	Perbaikan Proposal Skripsi Karna Pembahasan belum lengkap		
2.	17 Desember 2017	Perbaikan tentang Kerang- ka teori	Bab I	

3.	13 Januari 2018	Penambahan Pembahasan di Bab II	Bab II	
4.	5 Maret 2018	Pengyusunan di Bab III belum teratur	Bab III	
5.	30 Mei 2018	Kesimpulan harus sesuai dengan Pembahasan dan Perbanyak referensi	Bab IV	
6	4 Juni 2018	Ada kesalahan & dapat diujikan dalam monev		

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara
Airlangga Wicaksana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul :

“STRATEGI POLITIK PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) DAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KOTA PALEMBANG”

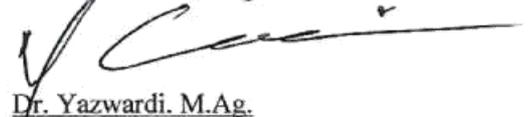
Yang ditulis oleh :

Nama : Airlangga Wicaksana
Nim : 1544300001
Jurusan : Politik Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat dilanjutkan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan Politik Islam.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 4-6 - 2018
Dosen Pembimbing I



Dr. Yazwardi. M.Ag.
NIP. 19710101 200003 1 006

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

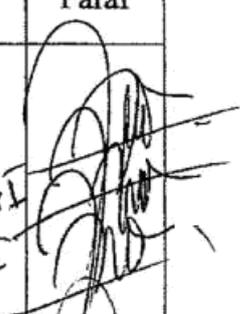
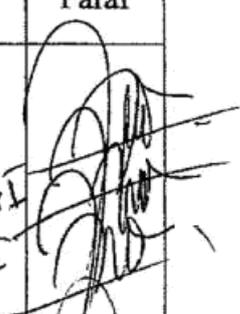
NAMA : Airlangga Wicaksana

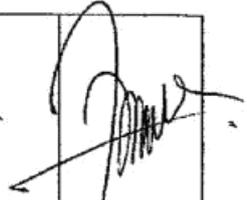
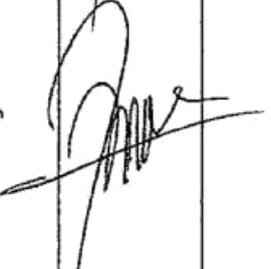
NIM : 1544300001

JURUSAN : POLITIK ISLAM

JUDUL SKRIPSI : Strategi Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di kota Palembang.

Dosen Pembimbing II : Yulion Zalpa, S.Pil., M.A.

No	Hari/Tanggal	Saran	Keterangan	Paraf
1.	14 Desember 2017	bandi teori (institutionalisasi Rurpd)	Perbaiki BAB I	
2.	18 Desember 2017	Perbaikan bab II (Trajektori & Histori)	Acc BAB I	
3.	10 Januari 2018	Perbaikan BAB III	Acc BAB II	
4.	11 Februari 2018	banyak data yg kurang Terkait Strategi Pemenangan	Perbaiki BAB III	
5.	18 Februari 2018	institutionalisasi Partai belum dipetik dalam Analisa	Perbaiki BAB III	

6.	25 Februari	kurang sub-bab yang belum jelas,	Perbaikan BAB III	
7.	01 Maret	Perbaikan sinkronisasi Penulisan yang masih salah	Perbaikan BAB III	
8.	26 Maret	Desain layout Daftar pustaka tabel dan grafik	Perbaikan BAB III	
9.	23 April 2018	Perbaikan Kumpulan	Perbaikan BAB IV	
10.	23 Mei 2018	Daftar pustaka masih salah Penulisan	Perbaikan.	
11.	29 Mei 2018		Acc BAB IV	

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara
Airlangga Wicaksana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul :

“STRATEGI POLITIK PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) DAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KOTA PALEMBANG ”

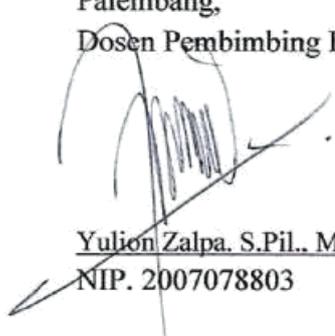
Yang ditulis oleh :

Nama : Airlangga Wicaksana
Nim : 1544300001
Jurusan : Politik Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat dilanjutkan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan Politik Islam.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2018
Dosen Pembimbing II


Yulion Zalpa, S.Pil., M.A.
NIP. 2007078803

Nomor : B- 089 /Un.09/IV.1/PP.01/ 01 /2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon izin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua DPC Partai Persatuan
Pembangunan ((PPP)
Kota Palembang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penyusunan skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, maka dengan ini kami mohon kepada bapak/ibu kiranya dapat memberikan izin penelitian/observasi kepada mahasiswa kami sbb:

No	Nama/NIM	Jurusan/ Prodi	Tempat Penelitian/ observasi	Judul Penelitian/ data yang dicari
1	Airlangga Wicaksana 1544300001	Politik Islam	Kantor DPC PPP Kota Palembang	"Strategi Politik Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Palembang"

Untuk melakukan pengambilan data penelitian/ observasi
Lama pengambilan data : 19 Januari s.d. 19 Maret 2018

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon bapak/ibu tidak berkeberatan untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa kami, sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari instansi yang berada dalam binaan bapak/ibu, untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas dimaksud.

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 16 Januari 2018

A.N. Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Endang Rochmiatun, M. Hum
NIP. 197107271997032005



**DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
KOTA PALEMBANG**

Jalan Merdeka No. 685 Palembang Telpn 0711-5732477
email : PPP_Palembang@yahoo.com

Nomor : 0147/EX/G.10/IV/2018
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Palembang, 19 April 2018 M
03 Sya'ban 1439 H

**Kepada Yth,
Pimpinan UIN Raden Fatah Palembang
Di-**

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam dan do'a kami semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho kepada kita semua, Amin.

Menindaklanjuti Surat dari UIN Raden Fatah Palembang Fakultas Adab dan Humaniora Nomor : B-089/UN.09/IV/1/PP.01/01/2018 Perihal : Mohon Izin Penelitian, dengan ini kami menerima saudara Airlangga Wicaksana NIM 1504300001 Untuk Melakukan Pengambilan Data Penelitian/Observasi.

Saudara Airlangga Wicaksana telah melaksanakan penelitiannya/observasi secara langsung baik wawancara serta data. Data yang dibutuhkan telah kami berikan dan yang bersangkutan kami nilai cekatan dan sopan dalam melaksanakan penelitiannya.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

**Wabillahi taufiq walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

**Dewan Pimpinan Cabang
Pengurus Harian Cabang**

Wakil Ketua

Latief Musom



Wakil Sekretaris

Fitriani

Nomor : B-089/Un.09/IV.1/PP.01/01/2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon izin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua DPC Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP)
Kota Palembang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penyusunan skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, maka dengan ini kami mohon kepada bapak/ibu kiranya dapat memberikan izin penelitian/observasi kepada mahasiswa kami sbb:

No	Nama/NIM	Jurusan/ Prodi	Tempat Penelitian/ observasi	Judul Penelitian/ data yang dicari
1	Airlangga Wicaksana 1544300001	Politik Islam	Kantor DPC PDIP Kota Palembang	"Strategi Politik Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Palembang"

Untuk melakukan pengambilan data penelitian/ observasi
Lama pengambilan data : 19 Januari s.d. 19 Maret 2018

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon bapak/ibu tidak berkeberatan untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa kami, sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari instansi yang berada dalam binaan bapak/ibu, untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas dimaksud.

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 16 Januari 2018

A. N. Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Endang Rochmiatun, M. Hum
NIP. 197107271997032005



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(DPD - PDI PERJUANGAN)
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Palembang, 30 April 2018

Nomor : ~~579~~/EV/DPD.19-B/IV/2018
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada Yth.
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**
di -
Palembang

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilakukannya penelitian di Kantor Sekretariat DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan oleh :

Nama : **Airlangga Wicaksana**
NIM : **1544300001**
Jurusan : **Politik Islam Fakultas Adab Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang**
Judul Skripsi : **“Strategi Politik Partai Persatuan Pembangunan dan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada
pemilu legislatif tahun 2014 di kota Palembang”**

Demikianlah surat keterangan ini disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Ketua,

H.M. GIRI RAMANDA NK, SE., MM

Sekretaris,



H.M. ILYAS PANJI ALAM, SH., SE., MM

Tembusan :
1. Arsip

Nomor : B-089 /Un.09/IV.1/PP.01/ 01 /2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon izin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan
Umum (KPU)
Kota Palembang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penyusunan skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, maka dengan ini kami mohon kepada bapak/ibu kiranya dapat memberikan izin penelitian/observasi kepada mahasiswa kami sbb:

No	Nama/NIM	Jurusan/ Prodi	Tempat Penelitian/ observasi	Judul Penelitian/ data yang dicari
1	Airlangga Wicaksana 1544300001	Politik Islam	Kantor KPU Kota Palembang	"Strategi Politik Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Palembang"

Untuk melakukan pengambilan data penelitian/ observasi
Lama pengambilan data : 19 Januari s.d. 19 Maret 2018

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon bapak/ibu tidak berkeberatan untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa kami, sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari instansi yang berada dalam binaan bapak/ibu, untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas dimaksud.

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 16 Januari 2018

Wakil Dekan
Wakil Dekan I
Dadang Rochmiatun, M. Hum
NIP. 197107271997032005





KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

Alamat : Jl. Mayor Santoso No.2 Kamboja Palembang

Telp. 0711-351709

Fax: 0711-378509

Palembang, 18 Januari 2018

Nomor : 080/TU.01-SD/1671/KPU-Kot/I/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
di-
Palembang

Sehubungan dengan Surat saudara nomor B-089/Un.09/IV.1/PP.01/01/2018 tanggal 16 Januari 2018 perihal mohon izin penelitian, dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai tugas akhir atas nama " **Airlangga Wicaksana** " dengan judul " *Strategi politik Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Palembang.*"

Perlu kami informasikan beberapa hal sebagai berikut :

- Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat menyetujui permohonan tersebut;
- Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga
- Izin pengambilan data di laksanakan selama 19 Januari s.d 19 Maret 2018.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG
SYARIFUDIN, SE., M.Si

Tembusan:

- Arsip.

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**
(Central Board of United Development Party)

Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta 10310 Telp. (021) 31936338. 31926164 Fax (021) 3142558
Alamat Sementara : Jl. Tabet Barat IX No. 17, Jakarta 12810 Telp. (021) 83795953/54 Fax (021) 83795955/29374125
Website : www.ppp.or.id -- Email : dpp@ppp.or.id, kominfadpp.ppp@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1

Lampiran 1 : Surat Keputusan DPP PPP Nomor : 0038/SK/DPP/C/III/2016
Tanggal 17 Maret 2016

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
PENGURUS HARIAN DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
KOTA PALEMBANG MASA BAKTI 2011 - 2016**

Ketua : Drs. Azhari Mawardi, MM

Wakil Ketua : H. Syahril Edi, SH
Wakil Ketua : H. Amiruddin Muslim
Wakil Ketua : Syamsul Bahirun, S.Pd.
Wakil Ketua : Desmana, Amd.
Wakil Ketua : Ahmad Zamhari, S.Pd., MM
Wakil Ketua : Rusman Effendi, S.IP
Wakil Ketua : Nurul Chotimah, S.Ag
Wakil Ketua : Euis Sundari, SH
Wakil Ketua : Hj. Jamilah, SH

Sekretaris : Ernan Satriahady, S:IP

Wakil Sekretaris : M. Syafriansyah, SP
Wakil Sekretaris : Abdul karim
Wakil Sekretaris : Edwin Setia Budi, SH
Wakil Sekretaris : Hasnul Amin
Wakil Sekretaris : H. Herzil Imani Husin
Wakil Sekretaris : Ahmad Zaki Wahid Amrullah, ST
Wakil Sekretaris : M. Apri Zaini, SE, S.Ag.
Wakil Sekretaris : Yuliaty, SH
Wakil Sekretaris : R. A. Nurul Aini, S.Ag.

Bendahara : H. Taufiq Hidayat, BSc

Wakil Bendahara : Yulilia Harlin, ST
Wakil Bendahara : Rosdiana, S.Pd.

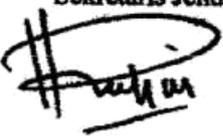
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Jumadil Akhir, 1437 H
17 Maret, 2016 M

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PENGURUS HARIAN
Sekretaris Jenderal,**

Ketua Umum,

DR. H. Suryadharma Ali, M.Si.




Ir. H. M. Romahurmuziy, MT.

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
(Central Board of United Development Party)

Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta 10310 Telp. (021) 31936338, 31926164 Fax (021) 3142558
Alamat Sementara : Jl. Tebet Barat IX No. 17, Jakarta 12810 Telp. (021) 83795953/54 Fax (021) 83795955/29374125
Website : www.ppp.or.id - Email : dpp@ppp.or.id, kominfodpp.ppp@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

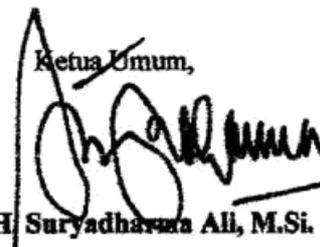
2

Lampiran 2 : Surat Keputusan DPP PPP Nomor : 0038/SK/DPP/C/III/2016
Tanggal 17 Maret 2016

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
PIMPINAN MAJELIS PERTIMBANGAN DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
KOTA PALEMBANG MASA BAKTI 2011 - 2016**

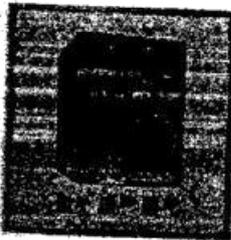
Ketua : H. M. Yunus H. Mansyur
Wakil Ketua : Ust. H. Habibi Al Hafiz
Wakil Ketua : Abdul Gofar AR
Wakil Ketua : RM. Zainudin Muhammad
Sekretaris : H. M. Bangun Sahraya, S.Kom.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Jumadil Akhir, 1437 H
17 Maret, 2016 M

Ketua Umum,

DR. H. Suryadharma Ali, M.Si.


DEWAN PIMPINAN PUSAT
PENGURUS HARIAN
Sekretaris Jenderal,

Ir. H. M. Romahurmuzyi, MT.



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**
(Central Board of United Development Party)

Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta 10310 Telp. (021) 31936338. 31926164 Fax (021) 3142558
Alamat Sementara : Jl. Tebet Barat IX No. 17, Jakarta 12810 Telp. (021) 83795953/54 Fax (021) 83795955/28374125
Website : www.ppp.or.id ~ Email : dpp@ppp.or.id, kominfodpp.ppp@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

3

Lampiran 3 : Surat Keputusan DPP PPP Nomor : 0038/SK/DPP/C/III/2016
Tanggal 17 Maret 2016

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
PIMPINAN MAJELIS PAKAR DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
KOTA PALEMBANG MASA BAKTI 2011 - 2016**

Ketua	: H. Muslim Abdullah, SH
Wakil Ketua	: H. Taufik Hasnuri
Wakil Ketua	: Umi Choiriati, SH
Wakil Ketua	: Hauli Nawawi
Sekretaris	: Ir. H. Jalaludin Arif
Wakil Sekretaris	: Drs. Amirodi Winta
Wakil Sekretaris	: Warman

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Jumadil Akhir, 1437 H
17 Maret, 2016 M

Ketua Umum,

DR. H. Suryadharma Ali, M.Si.



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PENGURUS HARIAN
Sekretaris Jenderal,**

Ir. H. M. Romahurmuzyi, MT.



**Daftar Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Fraksi
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP
Sumatera Selatan Periode 2010-2015**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ir. H. Eddy Santana Putra, MT	KETUA
2.	H. Fahlevi Maizano, SH., MH	Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai
3.	H. M. Giri Ramanda N. Kiemas, SE., MM	Wakil Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga
4.	H. Darmadi Djufri, SH., MH	Wakil Ketua Bidang Organisasi
5.	H. M. Ilyas Panji Alam, SH., SE., MM	Wakil Ketua Bidang Keanggotaan, Kaderisasi dan Rekrutmen
6.	Ir. Yudha Rinaldi	Wakil Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi
7.	Herlan, SE., M.Si., MBM	Wakil Ketua Bidang Sumber Daya dan Dana
8.	Dr. Ir. Hj. Elmeizy Arafah, MS	Wakil Ketua Bidang Pertanian
9.	Ir. H. Aswandi Asgap Serampoe	Wakil Ketua Bidang Perikanan dan Kelautan
10.	Susanto Adjis, SH	Wakil Ketua Bidang Kesehatan dan Tenaga Kerja
11.	H. Said Albar, SH., MM	Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan
12.	Endang Wasiati, SE	Wakil Ketua Bidang Industri dan Perdagangan, Pengusaha Kecil-Menengah dan Koperasi
13.	Robby B. Puruhita, SE	Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga
14.	Hj. Sumiati, SH., MM	Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak

15.	H. A. Syamubi, SP., MM	Wakil Ketua Bidang Pemerintah dan Otonomi Daerah
16.	H. Saichoe Goenawan Moeslimin, SH	Wakil Ketua Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan

17.	M. A. Gantada, SH., M. Hum	SEKRETARIS
18.	Usman Effendi, SH., M.Hum	Wakil Sekretaris Bidang Internal
19.	Riza Toni Siahaan, STP	Wakil Sekretaris Bidang Program
20.	H. Ishak Yulian Yusuf, SE., MBA	Bendahara
21.	Drs. Barata Rahadi Wibowo	Wakil Bendahara

LAMPIRAN I : Surat Keputusan DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan

Nomor : /KPTS/DPD.19-B/ /2018; Tanggal :

2018

TENTANG

**STRUKTUR DAN KOMPOSISI KEPENGURUSAN
BADAN PEMENANGAN PEMILU (BP-PEMILU)
DAERAH SUMATERA SELATAN
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**

NO	JABATAN	NAMA
I	KEPALA	: ROBBY B. PURUHITA, SE
	WAKIL KEPALA	: <ul style="list-style-type: none">• ACHMAD SAZALI, S.Pd., M.Si• Drs. H. M. SYARIF HIDAYAT, MM
	SEKRETARIS	: USMAN EFFENDI, SH., M.Hum
	WAKIL SEKRETARIS	: BUSTANUL FAHMI, S.Kom
	BENDAHARA	: H. ASNAWI, HD
	WAKIL BENDAHARA	: FEBY VALENTIN, S.Kom
II	KOORDINATOR BIDANG INTERNAL	: BAMBANG YUSNANTARA, S.Ip
	BIDANG INTERNAL 1 (RISET/ SURVEY/ DATA/ ANALISA)	: <ul style="list-style-type: none">• MUHAMMAD ERWINSYAH
	BIDANG INTERNAL 2 (SUMBER DAYA LOGISTIK)	: <ul style="list-style-type: none">• YUDHISTIRA, SE
III	KOORDINATOR BIDANG EKSTERNAL	: YOYON, SP
	BIDANG EKSTERNAL 1 (KAMPANYE DAN MEDIA)	: <ul style="list-style-type: none">• IKBAL
	BIDANG EKSTERNAL 2 (PENGALANGAN AKSI & PENERANGAN MASSA)	: <ul style="list-style-type: none">• FIRLY DARTA, SH
IV	KOORDINATOR BIDANG TERITORIAL	: ANDREAS OP, SE.Ak
	BIDANG TERITORIAL 1 (PERENCANAAN DAN STRATEGI)	: <ul style="list-style-type: none">• KURNIAWAN HIDAYAT, SH
	BIDANG TERITORIAL 2 (PENGALANGAN SEKTOR DAN RELAWAN)	: <ul style="list-style-type: none">• ZAMZAM MABRUR NURIS, SH
	BIDANG TERITORIAL 3 (PENGALANGAN K/L, TIGA PILAR, KPU/KPUD DAN BAWASLU/PANWASLU)	: <ul style="list-style-type: none">• IBRAHIM ADHA, SH



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 353480 website : www.radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS BTA DAN TAHFIDZ AL-QURAN

Nomor : 13/LAB-FA/BTA&TQ/V/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Abdurrasyid, M.Ag
NIP : 19670222 1994031003
Jabatan : Kepala Laboratorium Fakultas Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Menyatakan dengan sesungguhnya Bahwa :

Nama : AIRLANGGA WICAKSANA
NIM : 1544300001
Jur/Konsentrasi : POLITIK ISLAM

Telah mengikuti bimbingan BTA dan menghafal surah serta ayat-ayat Pilihan sebagai berikut :

No	Nama Surah	Ayat
1.	Al-Kautsar	1-3
2.	Al-Humazah	1-9
3.	Al-Mu'minun	1-11
4.	Al-Mujadalah	9-11
5.	Al-Ghasyiah	1-26
6.	Al-Baqarah	225
7.	Al-Baqarah	284-286
8.	Adh-Dhuha	1-11
9.	Al-Bayyinah	1-8
10.	Asy-Syams	1-15
11.	Al-Kahfi	107-110
12.	An-Nur	35
13.	Al-Fath	29
14.	Al-Jumu'ah	9-11
15.	Al-Hasyr	18-21

Dengan Predikat :

Baik,

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang 4 MEI 2018

Kepala Laboratorium



Drs. Abdurrasyid, M.Ag

NIP. 196702221994031 003





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
LANGUAGE CENTRE
JLN. PROF.ZAINAL ABIDIN FIKRI KM 3.5
PALEMBANG TELP : 0711 354668 psw 147

TOEFL PREDICTION SCORE

SECTION 1	SECTION 2	SECTION 3	TOTAL SCORE
41	40	43	413

TOEFL PREDICTION TEST

FULL NAME

AIRLANGGA WICAKSANA

SEX

M

DATE OF BIRTH

04/07/1994

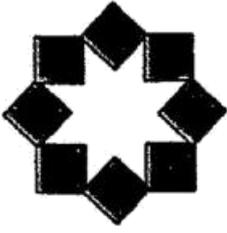
TEST DATE

18/04/2018

18042018



The person whose name appears above has taken the TOEFL PREDICTION TEST at UIN Raden Fatah Language Centre.
This score is valid for six months.



PANITIA PELAKSANA
 PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QURAN
 FAKULTAS ADAB DAN BUDAYA ISLAM IAIN RADEN FATAH
 TAHUN AKADEMIK. 2012-2013

Sertifikat

Dibehikah kepada:

NAMA : Afrangga Wicaksana

NIM : 12421001

Sebagai peserta didik Baca Tulis Al-Quran dan dinyatakan
 Lulus dengan nilai 76 (SB)

Mengetahui



Dr. H. J. Suyuthi P, M.A.
 NIP. 19560713 198503 1 001

Palembang, Oktober 2013
 Ketua,

Otoman, S.S., M. Hum.
 NIP. 19760516 200710 1 005



SERTIFIKAT

Nomor : In.03 / 10.1 / Kp.01 / 020 / 2015

Diberikan kepada :

AIRLANGGA WICAKSANA

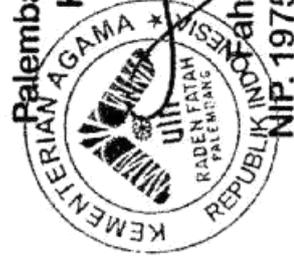
NIM : 12421001

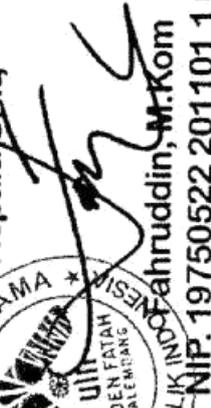
Telah dinyatakan **LULUS** dalam mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Komputer yang diselenggarakan oleh PUSTIPD UIN Raden Fatah pada Semester I dan Semester II Tahun Akademik 2012 - 2013

Transkrip Nilai :

Program Aplikasi	Nilai	Nilai Akumulasi
Microsoft Word 2003	B	
Microsoft Excel 2003	B	

Palembang, 16 Maret 2015
Kepala Unit,




NIP. 19750522 201101 1 001



**KULIAH KERJA NYATA (KKN) TEMATIK POSDAYA BERBASIS MASJID
ANGKATAN KE 66 TAHUN 2016 UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Sertifikat

Nomor : Un.09/8.0/PP.00/226/2016

Diberikan Kepada:

Nama : Airlangga Wicaksana

Tempat / Tgl. lahir : Palembang, 4 Juli 1994

NIM / Jurusan / Fak : 1544300001 / I.Politik / Adab dan Humaniora

Teah Melaksanakan Program Kulliah Kerja Nyata Angkatan 66 Tematik Posdaya Berbasis Masjid
Dari Tanggal 02 Februari s/d 17 Maret 2016 Di :

Desa : Lawang Agung

Kecamatan : Mulak Ulu

Kabupaten : Lahat

Lulus dengan nilai : A

Kepadanya Diberikan Hak Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku
Palembang, 30 Mei 2016

Ketua



Dr. H. Ris'an Rusli, MA
NIP. 19650919 199203 1 003